

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan sistem dalam Pemerintahan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tetapi disebabkan Undang-undang ini masih belum memiliki peraturan turunan terkait penyusunan LKPJ maka aturan turunan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Terdapat perbedaan dengan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun-tahun sebelumnya, di mana pada laporan-laporan tersebut pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Pada Peraturan Pemerintah tersebut di atas, hanya ada dua urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

Pada LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 ini, pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 11 dan 12. Di dalam Pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi dua menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu sendiri terbagi menjadi urusan pemerintahan yang

berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (1) tenaga kerja; (2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (3) pangan; (4) pertanahan; (5) lingkungan hidup; (6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) pemberdayaan masyarakat dan desa; (8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (9) perhubungan; (10) komunikasi dan informatika; (11) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (12) penanaman modal; (13) kepemudaan dan olah raga; (14) statistik; (15) persandian; (16) kebudayaan; (17) perpustakaan; dan (18) kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (1) kelautan dan perikanan; (2) pariwisata; (3) pertanian; (4) kehutanan; (5) energi dan sumberdaya mineral; (6) perdagangan; (7) perindustrian; dan (8) transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana yang diuraikan di atas, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Fungsi penunjang urusan pemerintahan tersebut mencakup: (1) perencanaan; (2) keuangan; (3) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; (4) penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup: (5) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; (6) pengawasan; dan (7) pemerintahan umum.

A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Di bawah ini diuraikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada tahun 2017 beserta hasil-hasilnya. Khusus untuk prestasi dan penghargaan

yang diraih disajikan pada Lampiran A dan target serta capaian indikator kinerja disajikan pada Lampiran B.

1. Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan baik melalui alokasi pembiayaan pendidikan dan program-program peningkatan prestasi akademik maupun non akademik bagi pendidik, tenaga kependidikan, siswa, dan lembaga atau sekolah. Kewenangan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan urusan pendidikan meliputi PAUD, SD, SMP, serta pendidikan non formal dan informal.

Sejalan dengan Visi Bupati Bantul untuk mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam wadah NKRI, peningkatan kualitas pendidikan menjadi hal yang diprioritaskan. Komitmen ini tercermin dari meningkatnya BOP jenjang PAUD, SD, dan SMP yang signifikan. Selain itu alokasi BOP juga diberikan untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang ikut berperan dalam melayani dan mencerdaskan anak-anak Bantul.

Pada tahun 2017 kinerja urusan pendidikan tercermin dari dicapainya anugerah bunda PAUD nasional bagi Hj. Erna Suharsono. Kejuaraan Sekolah Sehat di tahun ke-5 ini secara nasional yang diwakili oleh SMAN 1 Banguntapan meraih *the best achievement* tingkat nasional dan TK Al-Azhar 38 dalam kategori *best performance* tingkat nasional. Prestasi di bidang sekolah berwawasan lingkungan Adiwiyata tingkat nasional diraih oleh SD Trirenggo, SMAN 1 Bantul, dan SMKN 1 Sewon. Prestasi pendidik sebagai kepala sekolah SMP terbaik tingkat nasional diraih oleh Dr. Titik Sunarti, M.Pd. dari SMPN 3 Banguntapan dan kepala sekolah SD diwakili oleh Istiani Nurkhasanah, M.Pd. dari SDN 1 Trirenggo. Penilik terbaik tingkat nasional diwakili oleh Drs. Suyanto, penilik Kecamatan Bantul. Prestasi di tingkat daerah kejuaraan Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP juara I diraih oleh Dhiya'ulhaq Annisa cabang

literasi Cipta Cerpen Berbahasa Indonesia dan Juara II diraih oleh Naddzwa Septianur Azizah cabang literasi Debat Bahasa Indonesia, keduanya adalah siswi dari SMPN 1 Bantul.

a. Program yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan dalam urusan pendidikan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- 2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 3) Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
- 4) Pendidikan non formal;
- 5) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- 6) Manajemen pelayanan pendidikan.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pendidikan, pelatihan, sosialisasi, Bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur dengan anggaran sebesar Rp653.907.000,00 dan realisasi sebesar Rp599.439.000,00 atau 91,70%. Hasil yang dicapai adalah:

- a) Melaksanakan penilaian angka kredit sebanyak 4.000 guru;
- b) Melaksanakan *Achievement Motivation Training* (AMT) guru kelas 6 SD dan 9 SMP sebanyak 1.542 guru;
- c) Melaksanakan penilaian kinerja guru.

Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga pendidik terlihat dari peningkatan kinerja dan keterampilannya dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

2) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1, Pasal 1, Butir 14 dinyatakan bahwa "pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut". Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal meliputi TK dan RA. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal meliputi KB, TPA, dan satuan PAUD sejenis.

Hasil penyelenggaraan PAUD formal dan PAUD nonformal di Kabupaten Bantul tahun 2017 disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2017

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Peserta Didik	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1.	TK/RA	1	553	29.220	2.367	1.692	71.48
2.	KB	0	484	9.896	1.463	0	0
3.	TPA	0	56	958	686	0	0
4.	SPS	0	250	4.492	684	0	0

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2018

Pada tahun 2017 sejumlah 4.471 pendidik PAUD non formal telah menerima insentif dari Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Adapun upaya untuk penguatan lembaga ditempuh melalui akreditasi lembaga PAUD, sedangkan peningkatan sumber daya

manusia melalui pelatihan bakat dan kreatifitas guru dan siswa diselenggarakan lomba peningkatan minat, bakat, dan kreatifitas.

Penyelenggaraan PAUD didukung dana APBD melalui program pendidikan anak usia dini sebesar Rp14.315.034.850,00 dengan realisasi Rp14.105.982.259,00 atau 98,54%. Hasil (*outcome*) yang diperoleh dari penyelenggaraan PAUD di atas adalah meningkatnya kesiapan anak usia dini untuk mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Manfaat dari program ini antara lain meningkatnya kualitas *input* (calon peserta didik) di SD secara keseluruhan dikarenakan kesiapan fisik, mental-spiritual, dan moral yang lebih baik pada saat menempuh pendidikan jenjang PAUD.

3) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Wajib belajar sembilan tahun yang bermutu dituntaskan melalui jalur pendidikan dasar jenjang SD dan SMP. Untuk penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun dilaksanakan dengan dukungan dana APBD sebesar Rp60.001.535.150,00 dengan realisasi sebesar Rp57.814.946.407,00 atau 96,36%. Gambaran situasi dan kondisi yang mendukung keberhasilan wajib belajar sembilan tahun dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Data pada Tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan di Kabupaten Bantul dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun secara kuantitas telah cukup memadai. Jumlah guru SD yang telah bersertifikat pendidik profesional adalah 2.538 orang atau 51,36% dari total guru (PNS, guru tetap yayasan, dan GTT SD). Sementara itu, guru SMP yang telah bersertifikat pendidik profesional sejumlah 1.722 orang atau 69,72% dari total guru PNS, GTY, dan GTT. Banyaknya guru yang telah

bersertifikat pendidik profesional menunjukkan bahwa profesionalitas kinerja dan kesejahteraan pendidik di Kabupaten Bantul semakin meningkat.

Tabel 4.2
Kondisi Pendidikan Dasar
Tahun 2017

No.	Nama Lembaga	Jumlah		Jumlah Siswa	Guru		
		Negeri	Swasta		Jumlah	Sertifikasi	%
1	SD	281	80	75.339	4.942	2.538	51,36
2	MI	3	28	5.360	397	202	50,88
3	SLB	2	16	1.260	387	256	68,47
4	SMP	47	42	30.920	2.470	1.722	69,72
5	MTs	9	15	7.754	6.76	375	55,47
	Jumlah	342	181	117.633	8.872	5.093	57,40

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2018

Pemerintah Kabupaten Bantul telah memberikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk mendampingi Biaya Operasional Sekolah (BOS) dari pusat dan DIY, sehingga telah dapat membebaskan seluruh peserta didik SD/MI negeri dan SMP/MTs dari pungutan biaya operasional sekolah.

Kegiatan peningkatan akses pendidikan pada tahun 2017 dilakukan dengan pemberian Bosnas untuk siswa SD/MI sebesar Rp800.000,00/siswa/tahun, sedangkan untuk siswa SMP/MTs sebesar Rp1.000.000,00/siswa/tahun. Sementara itu dana BOP kabupaten untuk tiap siswa SD/MI sebesar Rp350.000,00 per siswa per tahun sedangkan untuk SMP sebesar Rp500.000,00/siswa/tahun. Selain itu juga diberikan dana bantuan bagi siswa miskin sebesar Rp450.000,00 per siswa per tahun dan SMP sebesar Rp750.000,00/siswa/tahun.

Kegiatan peningkatan prasarana dan sarana pendidikan SD telah dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan ruang kelas baru untuk lima SD (10 ruang kelas), rehabilitasi ruang kelas untuk delapan SD (18 ruang kelas), pengadaan alat peraga baca tulis Qur'an bagi 16 SD, pengadaan buku satu paket koleksi perpustakaan untuk 46

SD, pembangunan sanitasi untuk satu SD, dan pengadaan meubeler ruang kelas untuk tiga SD.

Untuk peningkatan prasarana dan sarana pendidikan SMP telah dilaksanakan pembangunan rehabilitasi enam ruang kelas yaitu rehabilitasi ruang kelas SMPN 1 Dlingo, ruang kelas SMPN 2 Imogiri, ruang kelas SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro, ruang kelas SMP Binajaya Banguntapan, ruang kelas SMP Muhammadiyah Banguntapan, ruang kelas SMP Muhammadiyah Sanden, serta bantuan komputer dan alat-alat laboratorium komputer.

Peningkatan sarana prasarana jenjang SD dan SMP tersebut, diharapkan dapat mendukung prestasi akademik dan non akademik siswa-siswa Kabupaten Bantul, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Upaya menyukseskan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) dan Ujian Nasional (UN) telah ditempuh berbagai langkah, di antaranya *try out*, monitoring, pengawasan, dan pelatihan serta pembuatan edaran tentang jam belajar dalam rangka persiapan US/M dan UN sampai dengan pelaksanaan US/M dan UN tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan alokasi dana untuk kegiatan songsong/sukses US/M dan songsong/sukses UN. Untuk US/M SD/MI diberikan subsidi yang besarnya Rp15.000,00/siswa kepada sekolah dan Rp10.000,00/siswa kepada Pokja, sedangkan subsidi UN jenjang SMP besarnya Rp30.000,00/siswa kepada sekolah dan Rp10.000,00/siswa kepada Pokja.

Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun adalah pembinaan minat, bakat, dan kreativitas anak SD/MI meliputi kegiatan lomba dokter kecil, lomba gugus bagi sekolah, lomba UKS bagi sekolah, lomba kreativitas bagi siswa, lomba olimpiade MIPA, lomba

olahraga, dan penyelenggaraan Kejar Paket A setara SD dan Kejar Paket B setara SMP. Melalui penyelenggaraan Kejar Paket A diharapkan dapat mengurangi angka buta huruf di Kabupaten Bantul, sedangkan melalui Kejar Paket B diharapkan mendukung keberhasilan implementasi wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat yang menyelesaikan pendidikan sampai setingkat jenjang SMP.

Untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah penduduk pada usia sekolah (usia 7-12 tahun), sedangkan APM adalah perbandingan jumlah siswa SD/MI usia 7-12 tahun dengan jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Realisasi APK SD/MI tahun 2017 sebesar 98,20%, menunjukkan adanya kenaikan sebesar 2,08% dari capaian tahun 2016 sebesar 96,12%. APK SMP/MTs tahun 2017 sebesar 99,23%.

Realisasi APM SD/MI pada tahun 2017 adalah 88,68%, adapun APM SMP/MTs tahun 2017 adalah 76,60%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun banyak yang tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut bersekolah di luar Kabupaten Bantul dan atau sudah masuk di jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Ukuran mutu sekolah salah satunya adalah akreditasi sekolah yang meliputi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hasil pelaksanaan akreditasi Kabupaten Bantul hingga akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut: jenjang SMP/MTs, dengan nilai A sebanyak 81 sekolah dan nilai B sebanyak 23 sekolah. Untuk jenjang SD dengan nilai A sebanyak 283 sekolah, nilai B sebanyak 99 sekolah.

Tingkat kelulusan jenjang SD/MI dan SMP/MTs tahun 2017 mencapai 100%, sesuai dengan target yang dicanangkan pada tahun 2017. Dalam kaitannya dengan angka putus sekolah, segala upaya telah dilakukan untuk meniadakan anak putus sekolah. Angka putus sekolah pada tahun 2017 untuk jenjang SD/MI sebesar 0,01% dan jenjang SMP/MTs tahun 2017 sebesar 0,02%.

4) Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan program pendidikan non formal diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melengkapi pendidikan formal. Lembaga pendidikan non formal yang ada di Kabupaten Bantul meliputi:

- a) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- c) Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- d) Rumah Pintar (Rumpin);
- e) *Homeschooling*.

Adapun data pendidikan non formal dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Kondisi Data Lembaga PNF Tahun 2017

No.	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Jumlah Warga Belajar	Jumlah Tutor
1	PKBM	27	1.768	423
2	LKP	44	3.452	98
3	TBM	47	-	-
4	Rumpin	2	9	9
5	<i>Homechooling</i>	2	21	10

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2017

a) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat (*Community*

Based Institution). Terminologi PKBM dari masyarakat, berarti bahwa pendirian PKBM merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Keinginan itu datang dari suatu kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu kehidupan melalui suatu proses transformasional dan pembelajaran. Program-program di PKBM sangat beragam dan sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat.

Program PKBM meliputi:

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- (2) Pendidikan keaksaraan fungsional (bagi buta aksara);
- (3) Pendidikan kesetaraan: paket A, paket B, dan paket C;
- (4) Pendidikan pemberdayaan perempuan;
- (5) Pendidikan ketrampilan dan kecakapan hidup (*life skills*);
- (6) Pendidikan kepemudaan;
- (7) Pendidikan ketrampilan kerja;
- (8) Pendidikan budaya baca.

Sejumlah empat belas PKBM di Kabupaten Bantul adalah penyelenggara program PAUD. Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang belum mampu menamatkan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dilakukan melalui program pendidikan kesetaraan yaitu Kelompok Belajar (Kejar) paket. Kejar paket A setara dengan SD, Kejar paket B setara dengan SMP, dan Kejar paket C setara dengan SMA (lihat Tabel 4.4).

Tabel 4.4
Data Program Kesetaraan Tahun 2017

No.	Nama Program	Jumlah Warga Belajar		Jumlah
		L	P	
1	Paket A	251	95	346
2	Paket B	271	204	475
3	Paket C	623	324	947

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2017

Hasil Ujian Nasional Program Kesetaraan (UNPK) tahun 2017 baik paket B dan C serta ujian sekolah paket A penentuan kelulusan dilaksanakan oleh lembaga masing-masing. Adapun hasil ujian kesetaraan secara lengkap disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Ujian Nasional Program Kesetaraan Tahun 2017

Program	Jumlah Peserta	Lulus	Belum lulus	% Kelulusan
Tahap I				
Paket A	220	199	21	90,45
Paket B	551	514	37	93,28
Paket C	542	453	89	83,58
Tahap II				
Paket A	0	0	-	0
Paket B	35	34	1	97,14
Paket C	70	61	9	87,14

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2017

b) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program yang diselenggarakan oleh LKP meliputi pemberian layanan pendidikan dan kursus secara khusus untuk meningkatkan kualitas peserta didik seperti bimbingan belajar SD, SMP, SMA/SMK, kursus bahasa asing, kursus setir mobil, montir, rias pengantin, menjahit, komputer, tata boga, tata busana, dan akupuntur.

Program yang diselenggarakan LKP meliputi:

- (1) Pendidikan kecakapan hidup;
- (2) Pendidikan kepemudaan;

- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan;
- (4) Pendidikan ketrampilan kerja;
- (5) Bimbingan belajar.

c) Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Salah satu program pembangunan pendidikan adalah program pengembangan budaya baca dan perpustakaan. Program ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui peningkatan budaya baca serta penyediaan bahan bacaan yang berguna bagi aksarawan baru, maupun anggota masyarakat pada umumnya yang membutuhkan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan demi peningkatan wawasan serta produktivitas masyarakat. TBM sebagai medium pengembangan budaya baca merupakan tempat mengakses berbagai bahan bacaan seperti buku pelajaran, buku keterampilan praktis, buku pengetahuan, buku keagamaan, buku hiburan, karya-karya sastra serta bahan bacaan lainnya yang sesuai dengan kondisi obyektif dan kebutuhan masyarakat sekitar dan minat baca yang baik aksaran baru, peserta didik jalur pendidikan formal dan non-formal (warga belajar), dan masyarakat umum tanpa batas usia. Jumlah TBM di Kabupaten Bantul telah meningkat secara bermakna. Pada tahun 2017 terdapat 47 TBM dari 35 TBM pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 34.32 persen.

d) Rumah Pintar

Rumpin sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dapat mewadahi berbagai kegiatan dimulai dari pendidikan anak usia dini, remaja, kaum perempuan juga kelompok lanjut usia. Melalui rumah pintar terbangun

masyarakat cerdas, inovatif, kreatif, mandiri yang sejahtera. Rumah pintar memiliki minimal lima buah sentra kegiatan, yakni sentra buku, sentra bermain, sentra komputer, sentra panggung, dan sentra kriya. Kabupaten Bantul memiliki dua rumah pintar yaitu rumah pintar “*Luru Ilmu*” di Kecamatan Bambanglipuro dan rumah pintar “*Pijoengan*” di Kecamatan Piyungan. Rumpin “*Pijoengan*” pernah mendapat penghargaan sebagai Rumpin terbaik di Indonesia dalam kategori pengembangan sentra. Sentra unggulan Rumpin adalah pertanian dan ketrampilan produktif. Mengusung ikon **Sejengkal Lahan Seluas Harapan**, rumah pintar menggalakkan pertanian sayuran organik dimulai dari pekarangan warga.

e) *Homechooling*

Homeschooling adalah sebuah keluarga yang memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anak dan mendidik anaknya dengan berbasis rumah. Pada *homeschooling*, orang tua bertanggung jawab sepenuhnya atas proses pendidikan anak; sementara pada sekolah reguler tanggung jawab itu didelegasikan kepada guru dan sistem sekolah. Walaupun orang tua menjadi penanggung jawab utama *homeschooling*, tetapi pendidikan *homeschooling* tidak hanya dan tidak harus dilakukan oleh orang tua. Selain mengajar sendiri, orang tua dapat mengundang guru privat, mendaftarkan anak pada kursus, melibatkan anak-anak pada proses magang (*internship*), dan sebagainya. Sesuai namanya, proses *homeschooling* memang berpusat di rumah. Tetapi, proses *homeschooling* umumnya tidak hanya mengambil lokasi di rumah. Para orang tua *homeschooling* dapat menggunakan sarana apa saja dan di mana saja untuk pendidikan

homeschooling anaknya. Penyelenggara *homeschooling* di Kabupaten Bantul adalah Homeschooling Group Khairu Ummah yang beralamat di Jln. Sendang Kasihan, RT.06, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta dan INSPI di Kecamatan Piyungan.

Program pendidikan non formal didukung dana APBD sebesar Rp1.627.560.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.514.193.800.00 atau 93,03% yang dilaksanakan melalui tujuh kegiatan. Penyelenggaraan pendidikan non formal selain untuk membantu menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun, adalah memberikan kesempatan kepada warga belajar memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Prestasi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam program pendidikan non formal meliputi (tingkat nasional):

- a) Imalia Damayanti, SH; juara 1 nasional Tutor Keaksaraan;
- b) Wiwik Afifah, M.Pd; juara II nasional Tutor Paket B.
- c) Srihartanta, SE; juara III nasional Instruktur Komputer.

5) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan). SPM dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai SNP dan standar lainnya. Hasil pendataan dari SPM tentang analisis gap/kesenjangan serta perhitungan kebutuhan investasi tingkat kabupaten selanjutnya digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pemenuhan SPM Dikdas oleh tim SPM

Dikdas. Evaluasi standar pelayanan minimal dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp873.209.100,00 dan realisasi sebesar Rp807.098.012,00 atau 92,43%.

Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp555.607.500,00 dan realisasi sebesar Rp362.930.000,00 atau 65,3%. Hasil yang diperoleh adalah:

- a) Melatih manajemen bagi pengelola PAUD sebanyak 50 orang;
- b) Melatih manajemen bagi kepala sekolah taman kanak-kanak sebanyak 50 orang;
- c) Menyelenggarakan Diklat dasar pendidik PAUD non formal sebanyak 60 orang;
- d) Menyelenggarakan seleksi akademik calon kepala sekolah sebanyak 20 orang;
- e) Menyelenggarakan sosialisasi tunjangan profesi guru/sertifikasi guru sebanyak 4.429 guru;
- f) Menyelenggarakan seleksi guru dan kepala sekolah berprestasi sebanyak 35 guru TK, SD, dan SMP.

Dalam pelaksanaannya, dijumpai hambatan yaitu realisasi anggaran program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan hanya 65,3% dikarenakan kegiatan Diklat calon kepala sekolah tidak dapat dilaksanakan karena LP2KS mulai tahun anggaran 2017 tidak dapat melaksanakan kerja sama dengan cara pembayaran secara transfer ke rekening LP2KS.

6) Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program manajemen pelayanan pendidikan dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi secara lengkap tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bantul. Program manajemen pelayanan pendidikan didukung

dana APBD sebesar Rp628.725.500,00 dengan realisasi sebesar Rp603.100.150,00 atau 95,92%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini antara lain penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru, pembinaan dan operasional Dewan Pendidikan, pengembangan Jardiknas dan pemeliharaan ICT, penanaman iman taqwa dan akhlak mulia, dan peningkatan pelayanan pendidikan inklusi.

Penyusunan kalender pendidikan sangat penting dilaksanakan karena berguna sebagai pedoman jadwal penyelenggaraan pendidikan selama satu tahun ajaran, mulai penerimaan peserta didik baru sampai kelulusan. Kalender pendidikan tersebut memuat beberapa kegiatan dan alokasi waktu antara lain kegiatan PPDB, kegiatan belajar mengajar efektif, ujian tengah semester, ujian akhir semester, UNAS, praktek kerja lapangan/Praktek Kerja Industri (Prakerin), libur semester, dan lain-lain. Kegiatan PPDB berpedoman pada peraturan gubernur dan peraturan bupati tentang PPDB. Kegiatan penerimaan peserta didik baru sistem *Real Time Online* (RTO) bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan pendidikan dan solusinya disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Pendidikan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Kurangnya guru kelas pada jenjang SD	Optimalisasi pendidik dan pemberdayaan guru kontrak oleh dewan sekolah.
2	Untuk memenuhi SPM pendidikan dasar masih diperlukan pemenuhan sarana-prasarana seperti laboratorium, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah dan ruang perpustakaan	Pemenuhan Sarpras secara bertahap
3	Perlu peningkatan Kesejahteraan bagi GTT dan PTT	Diupayakan penambahan insentif secara bertahap.
4	Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk memberikan motivasi agar warga belajar memiliki kesadaran untuk belajar secara aktif di PKBM masing-masing
5	Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM	Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2018

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor di masyarakat.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mengimplementasikan Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang dituangkan dalam program Indonesia Sehat. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu: (1) penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan

mutu menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat (*benefit*), serta kendali mutu dan biaya. Kesemuanya itu ditujukan untuk tercapainya keluarga-keluarga sehat, yang disebut dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK).

Penerapan Program Indonesia Sehat di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

a. Program yang Dilaksanakan

Pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul diuraikan dalam berbagai program dan kegiatan. Program dalam urusan kesehatan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Obat dan perbekalan kesehatan;
- 2) Upaya kesehatan masyarakat;
- 3) Pengawasan obat dan makanan;
- 4) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Perbaikan gizi masyarakat;
- 6) Pengembangan lingkungan sehat;
- 7) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- 8) Standarisasi pelayanan kesehatan;
- 9) Pelayanan kesehatan penduduk miskin
- 10) Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya;
- 11) Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan;
- 12) Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita;
- 13) Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia;
- 14) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
- 15) Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular;
- 16) Peningkatan pelayanan rumah sakit.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program dalam urusan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program obat dan perbekalan kesehatan didukung oleh dana APBD sebesar Rp11.629.485.000,00 yang sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dipergunakan untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan serta pengadaan gedung instalasi farmasi berikut sarananya.

Ketersediaan obat semakin meningkat, ditandai dengan kualitas, kuantitas, dan jenis obat yang semakin beragam. Indikator penggunaan obat yang tepat bagi pasien adalah Penggunaan Obat Rasional (POR). Penggunaan obat yang rasional akan mengurangi dampak negatif resistensi kuman terhadap antibiotik tertentu, sehingga menurunkan angka kesakitan dan kematian. Cakupan POR sebesar 97,41% dengan target sebesar 95% dan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 96,26% pada tahun 2016. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan POR adalah peningkatan kepatuhan terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) pengobatan.

2) Upaya Kesehatan Masyarakat

Program upaya kesehatan masyarakat didukung dana APBD sebesar Rp76.007.849.228,80 yang sebagian besar merupakan biaya pelayanan kesehatan di 27 Puskesmas yang diperoleh melalui pendapatan Puskesmas. Sejak tanggal 2 Januari 2016, seluruh Puskesmas di Kabupaten Bantul berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah pengawasan Dinas Kesehatan. Puskesmas memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat, sesuai dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan. Kabupaten Bantul memiliki 27 Puskesmas dan 16 Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan.

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam menanggulangi permasalahan kesehatan ini, muncul berbagai kegiatan inovatif dari masyarakat maupun petugas. Dukungan dana DAK untuk pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp11.170.771.000,00. Adapun kegiatan inovatif yang dilakukan disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Puskesmas dengan Kegiatan Inovasi
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

No.	Puskesmas	Inovasi
1	Srandakan	Posyandu Remaja Srandakan, Satu Jentik Satu Rumah Satu Pemantau Jentik
2	Sanden	Siswa Pemberantas Jentik (Si Petik), Kader Pemantau Batuk
3	Kretek	Siap Kesehatan Bagi Nelayan (Sikabayan)
4	Pundong	Peduli Jiwa Sehat
5	Bambanglipuro	Paguyuban Penderita DM dan Hipertensi, Zero Gizi Buruk, Masyarakat

No.	Puskesmas	Inovasi
		Peduli Kesehatan
6	Pandak I	Remaja Peduli Sampah
7	Pandak II	Remaja Peduli Gizi Balita
8	Bantul I	Dusun Sehat Jiwa, <i>Brain Booster</i>
9	Bantul II	Warga Sehat Jiwa, Kelompok Curhat Ibu Hamil
10	Jetis I	Kelompok Lansia Peduli Kesehatan, Sapa Sehat Puskesmas (SMS Centre, <i>Healthy Club</i> Penderita DM Dan Hipertensi, Paguyuban Kuliner Peduli Sehat
11	Jetis II	Gerakan Peduli Kesehatan Jiwa
12	Imogiri I	Sedekah Sampah, Monitoring ASI <i>Mobile</i> Imogiri,
13	Imogiri II	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ)
14	Dlingo I	Kedai Dapur Terapi Untuk Balita Gizi Buruk, Kelas Lansia
15	Dlingo II	Lansia Sehat Mandiri Aktif Produktif, Pendampingan Bumil
16	Pleret	Kawasan Bebas Asap Rokok Di Purworejo dan Bauman (Kabar Purba), Kartu Pemantauan Balita (Tuman Balita)
17	Piyungan	Keluarga Dan Kelompok Peduli Lansia, Dakwah Kreatif Phbs Di Pondok Pesantren, Duta KB, Gerakan Remaja menjadikan Ibu Sehat (Genre Mihat)
18	Banguntapan I	Bantu Penderita Tuberculosis
19	Banguntapan II	Sekolah Peduli Kasus Anemia dan Gizi, Gigi Sehat Untuk Semua, Rencana Untuk Pengamanan Air Minum Masyarakat (Rupamu Manis)
20	Banguntapan III	Gerakan Masyarakat Membasmi Jentik (Gemar Mbatik)
21	Sewon I	Dusun Pemantauan Sarang Nyamuk (PSN),
22	Sewon II	Forum Remaja Sehat (Fresh), Anak-Anak Peduli Demam Berdarah (Adinda)
23	Kasihani I	Dokter Luar Biasa (Dokter Lubis), Dusun Percontohan Germas,
24	Kasihani II	Gerakan Peduli Masyarakat Sehat Jiwa (Gelimas Jiwo), Paguyuban Sehat Bersama Penyehat Tradisional, Gropyokan Omah Lemut (GOL)
25	Pajangan	Sahabat Edukasi Remaja, Pendampingan KDRT
26	Sedayu I	Masyarakat Mandiri Peduli Jentik di Dusun (Mama Petik Dusun), Gerakan Remaja Tangkis TB dan Anemia, Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan (Gemar Darling)
27	Sedayu II	Dusun Siaga Beraksi, Karang Taruna Muda dalam Gerakan Masyarakat Sehat (Kamu Germas)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Upaya mengintegrasikan kegiatan UKP dan UKM di Puskesmas dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dengan sasaran keluarga yang didasarkan pada data dan informasi dari profil kesehatan keluarga.

Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga ke luar gedung dengan mengunjungi keluarga

di wilayah kerjanya. Selain itu Puskesmas juga harus meningkatkan kerjasama dengan jejaringnya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain di wilayah kerjanya, agar fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tersebut turut menyelesaikan masalah-masalah kesehatan keluarga dari peserta JKN yang dilayaninya.

Pelaksanaan PISPK di Kabupaten Bantul dilakukan secara bertahap. Tahap pertama PISPK dilaksanakan oleh lima Puskesmas lokus yang ditunjuk dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan PISPK di wilayah kerjanya, yaitu Puskesmas Bambanglipuro, Sanden, Kretek, Sewon I, dan Kasihan I. Kegiatan PISPK yaitu dengan melakukan kunjungan ke keluarga pada satu desa di wilayah kerjanya. Selanjutnya, 22 Puskesmas yang lain secara bertahap telah dilakukan pembekalan untuk mempersiapkan pelaksanaan PISPK di tahun 2018.

Upaya kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi standar mutu pelayanan. Penyelenggaraan rekomendasi perijinan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menilai dan memberikan legalitas pada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar. Jenis dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2017 disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 dan 2017

No.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2016	2017
1	Rumah Sakit Umum	10	11
2	Rumah Sakit Bersalin	0	0
3	Rumah Sakit Khusus (Bedah, Paru dan KIA)	5	5
4	Klinik Utama	2	3
5	Klinik Pratama	-	55
	Klinik Pratama Rawat Jalan	38	45
	Klinik Pratama Rawat Inap	9	10
6	Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	3	5
7	Apotek	123	125

No.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum	2016	2017
8	Klinik kecantikan estetika	10	9
9	Laboratorium	4	3
10	Toko Obat	4	5
11	Optik	12	12
12	Puskesmas Rawat Inap	16	16
13	Puskesmas Non Rawat Inap	11	11
14	Puskesmas Pembantu	65	65
15	Puskesmas Keliling	27	27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Bantul. Fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat diikuti dengan ketersediaan jumlah tenaga kesehatan, disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Jumlah Tenaga Kesehatan
di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Tahun 2016 dan 2017

No.	Jenis Tenaga	2016	2017
1	Dokter Spesialis	61	65
2	Dokter Umum	127	154
3	Dokter Gigi Spesialis	6	7
4	Dokter Gigi	42	41
5	Perawat	670	703
6	Perawat Gigi	87	93
7	Bidan	306	317
8	Kefarmasian	85	92
9	Kesehatan Masyarakat	100	113
10	Sanitarian	58	64
11	Nutrisionis	63	69
12	Keterampilan Fisik	30	36
13	Teknis Medis	152	149
14	Tenaga Non Kesehatan	641	697

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kapasitas aparatur dilaksanakan dengan bimbingan teknis, *workshop*, sosialisasi, dan pengiriman Diklat. Bimbingan teknis bagi perawat dilaksanakan dengan melibatkan perawat

Puskesmas dan menghadirkan narasumber praktisi dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan tajuk *Assesment* Kegawatdaruratan.

Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga kesehatan bagi 32 orang CPNS bidan pasca PTT dengan materi penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK). Bidan pasca PTT telah diangkat menjadi CPNS melalui serangkaian pemberkasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul kemudian diteruskan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul.

Bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi ahli teknologi laboratorium medik menghadirkan narasumber praktisi dan dokter spesialis dari RS Panembahan Senopati, dengan materi penggunaan dan pemanfaatan alat laboratorium canggih.

Bimbingan teknis penyusunan DUPAK bagi sanitarian dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi 30 orang sanitarian dalam menjalankan ketugasan dan kewajibannya sebagai aparatur sipil negara.

Peningkatan kompetensi bagi tim penilai angka kredit dilakukan dengan mengirimkan 25 tim penilai angka kredit dari 12 jenis tenaga kesehatan untuk mengikuti Diklat bagi tim penilai DUPAK di Bapelkes Yogyakarta.

Workshop bagi calon tenaga kesehatan teladan dilaksanakan bagi 70 orang tenaga kesehatan dari 14 jenis tenaga kesehatan, dipersiapkan untuk penilaian Nakes teladan tahun 2018, 2019, dan 2020.

Peningkatan kapasitas bagi bidan Puskesmas yang bertanggung jawab mendampingi tumbuh kembang usia dini di wilayahnya dilakukan melalui bimbingan teknis Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh-Kembang (SDIDTK). Bimtek ini dalam rangka pembinaan tumbuh-kembang anak

secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa lima tahun pertama kehidupan.

3) Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini meliputi pengawasan obat dan makanan yang didukung dengan dana APBD sebesar Rp119.000.000,00. Program pengawasan obat meliputi kegiatan pengawasan obat pada fasilitas pelayanan kesehatan yaitu toko obat, apotek, klinik pratama dan utama, serta rumah sakit. Obat yang terdistribusi ke masyarakat harus terdaftar dan memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan makanan diselenggarakan melalui Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) bagi Industri Rumah Tangga (IRT) pangan dan pangan siap saji, sertifikasi PIRT, sertifikasi jasa boga, sertifikasi kantin sekolah, dan *sampling* makanan jajanan. Sampai dengan tahun 2016, telah diterbitkan 2.058 sertifikasi PIRT, meningkat menjadi 2.258 sertifikasi PIRT pada tahun 2017. Adapun hasil kegiatan pengawasan makanan disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Hasil Kegiatan Pengawasan Makanan Tahun 2016 dan 2017

No.	Jenis Pengawasan Makanan	2016	2017
1	PKP-PIRT	352 orang	200 orang
2	PKP kantin sekolah	44 orang	40 orang
3	PKP makanan jajanan	203 orang	120 orang
4	PKP jasa boga/catering	104 orang	40 orang
5	Sertifikasi PIRT	257 usaha IRT pangan	227 usaha IRT pangan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

4) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan promosi kesehatan dengan didukung oleh dana APBD sebesar Rp3.802.000.000,00. Program ini

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain:

a) Promosi Kesehatan

(1) Kampanye Germas

Kegiatan kampanye bagi guru TK, SD, SMP, dan SMA dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan, yaitu lomba cipta *jingle* Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan kreasi bekal sehat anak sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guru dalam mengemas informasi tentang Germas bagi anak sekolah.

Tema dalam kampanye Germas adalah “Dengan Germas wujudkan Generasi Hebat” (Hidup Sehat, Energik, Bahagia, Aktif, dan Tangguh).

Puncak acara dilaksanakan pada tanggal 27 April 2017 di Auditorium Taman Perwacy Banguntapan dan diikuti oleh 1200 guru dari berbagai tingkatan, dengan acara praktek makan buah bersama dipimpin oleh Wakil Bupati Bantul.

(2) Bantul Expo

Agenda tahunan pameran pembangunan Kabupaten Bantul yang diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Bantul menjadi salah satu media dalam mengembangkan potensi daerah. Tema yang diusung tahun ini adalah “Dengan Semangat Makaryo Mbangun Desa Kita Wujudkan Masyarakat Bantul Yang Cerdas dan Sejahtera”, diharapkan dapat membangkitkan ruh atau semangat untuk lebih giat membangun daerah dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada

untuk menghasilkan produk-produk berkualitas dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Bantul.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan dalam kegiatan Bantul Expo mengusung tema “Germas untuk Generasi Hebat”. Tema ini mempunyai arti bahwa dengan Germas mampu mewujudkan masyarakat yang lebih hebat, yaitu: hidup sehat, energik, bahagia, aktif, dan tangguh. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap orang atau masyarakat yang menerapkan perilaku hidup sehat maka badannya akan energik dan hidupnya akan bahagia. Orang yang sehat akan tercermin dari sikap dan perilaku yang aktif sehingga akan terwujud masyarakat yang tangguh.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Germas. Tiga indikator utama Germas adalah makan buah dan sayur, aktifitas fisik secara teratur, dan cek kesehatan secara rutin.

Kegiatan Bantul Expo dilaksanakan pada tanggal 28 Juli s.d 06 Agustus 2017 yang bertempat di Pasar Seni Gabusan. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain lomba foto selfie, permainan bidik buah dan sayur, ular tangga Germas, pemeriksaan kesehatan (cholesterol dan gula darah), dan percontohan aktifitas fisik.

Pengunjung tercatat sebanyak 2.339 orang, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 1.915 orang.

(3) Karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-72

Tema karnaval Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yaitu “Germas untuk Generasi Hebat”. Tema ini mempunyai arti bahwa dengan Germas mampu mewujudkan masyarakat yang lebih hebat, yaitu hidup sehat, energik, bahagia, aktif, dan tangguh.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk penyebarluasan informasi tentang Germas untuk pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM).

Kegiatan Karnaval dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2017. Rute: *start* dimulai dari Lapangan Trirenggo Bantul-Polsek Bantul-simpang lima Bejendan *finish* di perempatan Gose. Maskot: karakter tiga indikator Germas.

b) Pengembangan Media dan Teknologi Promosi Kesehatan

Dasar pelaksanaan kegiatan pengembangan media dan teknologi promosi kesehatan adalah Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor 800/3752 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kreatif Multimedia Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Tim kreatif ini diberi tugas untuk merencanakan, melaksanakan, monitoring, evaluasi serta melaksanakan penelitian maupun pengembangan model dan media promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Upaya pengembangan model dan media promosi kesehatan tahun 2017 berupa:

- (1) Pengembangan media promosi kesehatan berupa; siaran radio spot dan *live show* Taman Gabusan;
- (2) Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di televisi, ILM di radio, cetak spanduk, leaflet, stiker, poster, buku saku, dan Buletin;

- (3) Pengembangan model intervensi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat tingkat DIY di tiga dusun, yaitu Tilaman di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri; Sulang Kidul di Desa Patalan, Kecamatan Jetis; dan Mangunan di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo;
 - (4) Pengadaan *boardgame* (diabetes, PHBS dan Germas);
 - (5) Pelatihan penggunaan *boardgame*;
 - (6) Pelatihan untuk generasi muda milenial.
- c) Pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Rumah Tangga

Pembinaan PHBS dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum. Data capaian PHBS tahun 2017 di Kabupaten Bantul pada semua tatanan disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Hasil Capaian Tatanan PHBS Tahun 2016-2017

No.	Tatanan PHBS	2016	2017
1	Rumah Tangga	41,21%	47,14%
2	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	88,31%	83,82%
3	Institusi Pendidikan	44,38%	54,77%
4	Tempat Kerja	26,15%	39,15%
5	Tempat-tempat Umum	63,18%	58,52%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Dalam rangka hari kesatuan gerak PKK KB kesehatan, Desa Sumberagung memperoleh juara I pelaksana terbaik PHBS tingkat Provinsi DIY serta Desa Panggungharjo memperoleh juara I pelaksana terbaik

kesatuan gerak PKK KB kesehatan dan dipersiapkan maju ke tingkat nasional pada tahun 2018.

d) Kesehatan Anak Sekolah

Kegiatan pembinaan kesehatan anak sekolah ini bertujuan untuk mewujudkan tercapainya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada warga sekolah. Kegiatan yang menjadi indikator kinerja Dinas Kesehatan adalah pelaksanaan kegiatan penjangkaran kesehatan siswa baru yang dilakukan di SD, SMP, dan SMA, dengan pelaksana dari Puskesmas dan pihak sekolah. Hasil penjangkaran kesehatan di tingkat SD mencakup 100% siswa kelas satu setingkat SD, 99,94% siswa kelas satu setingkat SMP, dan 97,84% siswa kelas satu setingkat SMA.

Kegiatan lain yang telah dilakukan yaitu akselerasi program UKS pada enam tim pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan tiga Tim Pembina (TP) UKS kecamatan; evaluasi kader kesehatan remaja; dan pendampingan, monitoring, dan evaluasi penjangkaran kesehatan anak usia sekolah. Pada tahun 2017 tim pembina UKS Kabupaten Bantul berhasil mendapatkan **penghargaan kinerja terbaik Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat nasional** yaitu SMA N 1 Banguntapan dan **Juara Harapan I tingkat nasional yaitu TK Al-Azhar Bantul**. Untuk LSS tingkat DIY, Kabupaten Bantul meraih **Juara I** yaitu TK Al Farabi, SD Sungapan, dan SMK N 1 Sewon untuk mewakili Lomba sekolah sehat tingkat nasional di tahun 2018. Dokter kecil Kabupaten Bantul dari SD Muhammadiyah Bantul Kota, SD Karangjati, dan SD Padokan II **meraih Juara I tingkat DIY**.

Pembinaan PHBS di Pondok Pesantren (Pontren) yang merupakan bagian dari institusi pendidikan antara

lain melalui kegiatan pemberdayaan Forum Komunikasi Santri Sehat (FKSS), perencanaan dan evaluasi Pontren, pelatihan programer Pontren di Puskesmas, dan evaluasi kader santri siaga. Pembinaan Pontren dilaksanakan sebanyak 96 Pontren. Selain itu, pembinaan Pontren dilaksanakan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Pesantren. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pesantren.

e) Pemberdayaan Masyarakat

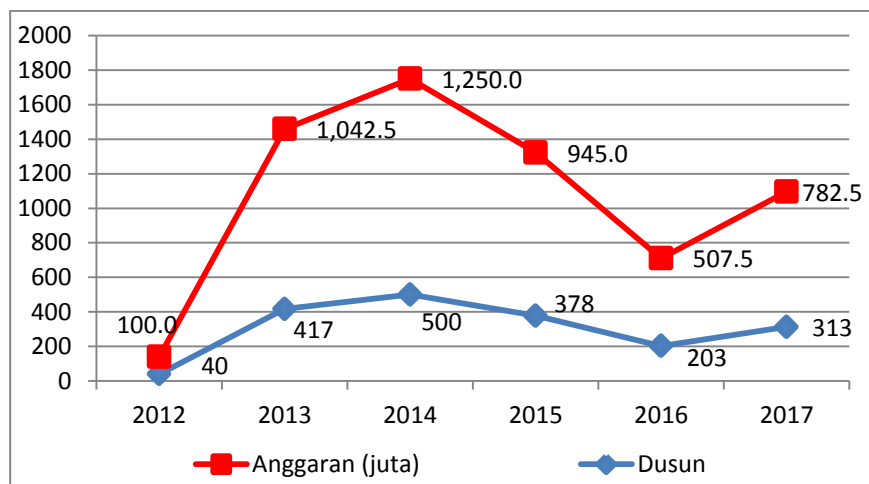
Peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui indikator desa siaga. Sebanyak 43 desa siaga termasuk dalam kategori baik, yaitu memiliki strata purnama dan mandiri.

Kegiatan inovatif pemberdayaan masyarakat berupa Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK), yang sudah dimulai sejak tahun 2007. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh *stakeholder*, termasuk juga para pejabat dan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan utama, yaitu menurunkan kematian ibu maternal, menurunkan kematian bayi, menurunkan jumlah penderita gizi buruk, menekan kasus DBD, dan meningkatkan penemuan kasus TB.

Unit analisis DB4MK telah diubah dari desa bebas 4 masalah kesehatan menjadi dusun bebas 4 masalah kesehatan. Hal ini berdasarkan aspirasi kepala desa dan masyarakat karena peluang masyarakat untuk mendapatkan *reward* lebih besar dengan unit analisis yang lebih kecil yaitu pedukuhan dan masyarakat mempunyai harapan yang lebih besar untuk mengupayakan daerahnya bebas empat masalah

kesehatan. *Reward* diberikan bagi dusun dengan kriteria bebas kematian ibu, kematian bayi, gizi buruk, dan DBD.

Pada tahun 2017, *reward* diberikan pada 313 pedukuhan dari 933 pedukuhan yang masyarakatnya secara aktif melakukan upaya pemberdayaan dan telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati Nomor 370 Tahun 2017 tentang Pemenang *Reward* DB4MK Plus. Tiap-tiap dusun pemenang mendapatkan piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp2.500.000,00 diterimakan melalui rekening kepala dusun pemenang. Pada tahun 2017, penilaian DB4MK ditingkatkan kualitasnya pada indikator status gizi buruk Balita, yaitu dusun yang masih memiliki Balita berstatus gizi buruk pada periode penilaian dinyatakan sebagai dusun yang tidak bebas gizi buruk. Hasil penilaian DB4MK tahun 2011-2017 disajikan pada Grafik 4.1.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Grafik 4.1
Hasil Penilaian DB4MK Tahun 2011-2017

5) Perbaikan Gizi Masyarakat

Program perbaikan gizi masyarakat pada tahun 2017 didukung APBD sebesar Rp725.000.000,00. Anggaran pada

program ini sebagian besar digunakan untuk pemberian makanan tambahan bagi Balita gizi KEP (kurus), ibu hamil KEK, dan anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin. Dukungan anggaran selain APBD Kabupaten juga dari dana APBD DIY sebesar Rp36.739.000,00 dan APBN sebesar Rp90.562.000,00. Pelaksanaan program perbaikan gizi dan hasilnya adalah sebagai berikut:

a) Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi

Pencapaian hasil distribusi vitamin A pada Balita pada tahun 2017 sebesar 99,79%, meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 99,68% dan berhasil mencapai target sebesar 99,00%.

b) Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)

Survei Kadarzi tahun 2016 memperoleh hasil sebesar 91,65% keluarga telah sadar gizi.

c) Pemantauan Penimbangan Balita

Hasil capaian pemantauan penimbangan Balita tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- (1) Partisipasi masyarakat diketahui melalui jumlah Balita yang ditimbang dibandingkan dengan seluruh Balita (D/S) sebesar 81,12% (meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 70,9%)
- (2) Kondisi kesehatan Balita diketahui melalui jumlah Balita yang naik berat badannya dibandingkan dengan Balita yang ditimbang (N/D) sebesar 60,35% (menurun dibanding tahun 2016 sebesar 70,94%).
- (3) Potensi masalah gizi diketahui melalui jumlah Balita yang memiliki berat badan di bawah garis merah dibandingkan dengan Balita yang ditimbang (BGM/D) sebesar 0,61%, meningkat dibanding tahun 2016

sebesar 0,56%. Hal ini menunjukkan adanya trend penurunan status gizi Balita.

Berbagai program perbaikan gizi telah diupayakan untuk meningkatkan status gizi. Kegiatan tersebut mencakup beberapa kegiatan yaitu surveilans gizi, penanggulangan masalah gizi melalui sosialisasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), sosialisasi pedoman gizi seimbang, penanggulangan anemia pada remaja melalui program sepekan, Bimtek dan peningkatan kapasitas petugas gizi, audit gizi buruk dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi. Upaya lain yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita KEP/kurus berupa bantuan makanan tambahan selama 180 hari makan anak bagi 600 Balita. Selain itu, upaya perbaikan gizi juga dilakukan dengan PMT bagi 300 ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) untuk 90 hari makan ibu.

Pada tahun 2017 status gizi buruk pada Balita sebesar 0,41% yaitu sebanyak 202 Balita gizi buruk dari 48.865 Balita yang diukur. Capaian ini juga sudah melampaui target DIY sebesar kurang dari 1%.

6) Pengembangan Lingkungan Sehat

Kegiatan pada program pengembangan lingkungan sehat adalah pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan yang didukung dana APBD sebesar Rp531.427.000,00. Hasil pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

a) Pengawasan dan pembinaan tempat-tempat umum (TTU)

Kegiatan berupa pelatihan kesehatan lingkungan untuk 30 sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dalam rangka mendukung program sekolah sehat.

b) Pengawasan dan Pembinaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Kegiatan berupa pelatihan laik sehat bagi 180 pelaku jasa boga (katering), restoran, rumah makan, kantin sekolah, Depot Air Minum.

c) Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Kegiatan ini mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Capaian kegiatan berupa deklarasi Stop BABS Kabupaten Bantul pada tanggal 10 Nopember 2017 dan klaim lima desa melaksanakan lima pilar STBM.



Gambar 4.1
Penandatanganan Deklarasi Stop BABS Kabupaten Bantul

Akses jamban tahun 2017 sebesar 100% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 97,0%. Hal ini berarti semua masyarakat Kabupaten Bantul sudah dapat mengakses jamban.

d) Pembinaan Kesehatan Kerja

Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di Kabupaten Bantul semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah industri dan usaha kerajinan. Kegiatan UKK berupa pembinaan kesehatan bagi 90 karyawan/pekerja pabrik sebagai kader kesehatan kerja dan pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di perusahaan dan UMKM.

Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Kerja di Kabupaten Bantul, telah dilakukan pendampingan upaya kesehatan kerja pada 444 industri rumah tangga dengan jumlah pekerja 6.241 yang berada di 27 Puskesmas dengan 70 pos UKK. Sejalan dengan peningkatan pelayanan di Puskesmas telah dilaksanakan pembinaan manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3) di 27 Puskesmas.

e) Pembinaan Kesehatan Olahraga

Kegiatan berupa tes kebugaran bagi calon jamaah haji, pemasyarakatan lomba senam kesegaran jasmani bagi anak sekolah, lomba cipta senam peregangan (*ice breaking*) dan pelatihan instruktur senam peregangan. Capaian kegiatan berupa pemeriksaan kebugaran 1.025 orang calon jamaah haji, pemasyarakatan dan pelatihan instruktur bagi seluruh OPD dan puskesmas di Kabupaten Bantul, terciptanya kreasi senam peregangan khusus Kabupaten Bantul, serta lomba senam yang diikuti oleh 500 anak sekolah.

f) Kabupaten Sehat

Kegiatan berupa pembinaan lokasi tatanan, persiapan verifikasi, dan pelaksanaan verifikasi.

Pelaksanaan verifikasi pada tanggal 18 September 2017 di tiap lokasi tatanan, yaitu:

- (1) Kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum yang berlokasi di Dusun Salakan, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan; Pasar Imogiri; dan SMA Negeri I Bantul;
- (2) Kawasan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, berlokasi di Dusun Glugo, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon;
- (3) Kawasan hutan sehat berlokasi di Dusun Pencitrejo, Desa Terong, Kecamatan Dlingo;
- (4) Ketahanan pangan dan gizi berlokasi di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret;
- (5) Kawasan pariwisata sehat berlokasi di Pantai Parangtritis, Kecamatan Kretek;
- (6) Kehidupan sosial yang sehat berlokasi di Dusun Nglaren, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan;
- (7) Kawasan industri dan perkantoran sehat berlokasi di Dusun Celan, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan dan Perkantoran Pemda II di Manding, Desa Tirenggo, Kecamatan Bantul.

Capaian kegiatan adalah penerimaan penghargaan Kabupaten Sehat Swasti Saba Wistara Klasifikasi Pengembangan untuk kedua kalinya. Ini merupakan predikat tertinggi dalam penghargaan kabupaten sehat.



Gambar 4.2
Wakil Bupati Bantul menerima piagam dan piala
Swasti Saba Wistara

g) Pengawasan Kualitas Air

Kegiatan pengawasan kualitas air meliputi pengawasan kualitas air baik secara internal maupun eksternal serta pembinaan DAM dan pengelola air minum pedesaan Yogyakarta. Pengawasan dilakukan terhadap air bersih maupun air minum. Pengawasan dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perusahaan Depot Air Minum (DAM), Pengelola Air Minum Pedesaan (Pamdes), dan sumber air bersih

masyarakat (sumur gali, mata air, dan lain-lain). Kegiatan pengawasan eksternal dilakukan dengan pengambilan sampel dan pengujian kualitas air.

Pengawasan kualitas air yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan anggaran APBD, mencakup sampel sejumlah 2.573 sampel, yang terdiri dari sampel air minum yang bersumber dari PDAM adalah lima sampel tiap kecamatan dan jumlah sampel air bersih sebanyak lima sampel tiap desa. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan air bersih dan air minum yang berkualitas.

Cakupan air bersih pada tahun 2017 sebesar 100%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sebesar 98,0%. Hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat Kabupaten Bantul sudah dapat mengakses air bersih, walaupun akses air bersih ini masih mengalami kendala dari segi kualitas, kontinuitas, dan kuantitas. Pada beberapa rumah tangga di Kecamatan Dlingo, Imogiri, dan Pandak, tidak semua air memenuhi syarat secara kualitas karena terjadi kesulitan mendapatkan air pada musim kemarau.

Dalam rangka mendukung pencapaian kualitas air, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok pengelola air minum pedesaan (Pamaskarta). Kegiatan pembinaan berupa pelatihan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) dan *workshop* peningkatan kualitas air Pamsimas. Kegiatan diikuti oleh 130 orang dari Pamaskarta.

7) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bertujuan untuk mengendalikan penularan penyakit dan menurunkan angka kesakitan karena penyakit menular.

Program P2PM ini didukung oleh dana APBD sebesar Rp579.488.000,00. Hasil pelaksanaan program ini meliputi:

a) Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Angka kesakitan DBD pada tahun 2017 sebesar 57,34 per 100.000 penduduk (534 kasus) lebih rendah dibanding tahun 2016 yaitu 262,95 per 100.000 penduduk (2442 kasus). Pada tahun 2017 terdapat dua kematian penderita DBD (angka kematian DBD/CFR DBD sebesar 0,38%), menurun dibandingkan tahun 2016 di mana terjadi lima kematian.

Berbagai upaya penanggulangan DBD yang telah dilakukan meliputi: pemberantasan sarang nyamuk yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dilakukan rutin, *fogging focus*, larvasidasi, penyuluhan kesehatan masyarakat, jumantik anak sekolah, dan pelatihan kader DBD desa serta kemitraan swasta.

b) Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis (TB)

Berbagai upaya penanggulangan TB melalui pemberdayaan masyarakat yaitu mengajak layanan kesehatan swasta untuk meningkatkan perannya, kampanye TB melalui media TV dan radio, bekerjasama dengan LSM PD Aisyah Bantul dan berbagai upaya kesehatan personal melalui *active selective case finding*, pengembangan poli batuk dan poli TB MDR di Puskesmas untuk memisahkan pasien batuk dengan pasien penyakit lain, mendistribusikan alat tes cepat molekuler ke RSPS sebagai RS rujukan TB Kebal Obat (TB-*Multi Drug Resisten/MDR*), dan melakukan kontrol kualitas pembacaan slide dahak melalui uji silang pembacaan di RS Respira.

Angka kesembuhan TB tahun 2017 sebesar 72,8% dari target 85%, meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 60,8%. Data ini merupakan hasil dari kesembuhan pasien yang diobati pada tahun 2016. Selain itu, penemuan kasus BTA positif pada tahun 2017 adalah sebanyak 214 kasus (sampai dengan TW3 dan belum PWS) dari target 620 kasus. Permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian TB antara lain adalah masih ada stigma/pengucilan terhadap penderita TB oleh masyarakat yang berakibat penderita enggan atau malu untuk berobat, adanya penderita yang *lost follow up* karena berpindah tempat tanpa bisa terlacak, dan terjadinya resistensi obat pada penderita TB.

c) Pencegahan dan Penanggulangan Leptospirosis

Pada tahun 2017 telah ditemukan kasus leptospirosis sebanyak 98 kasus dengan empat di antaranya meninggal dunia. Angka kesakitan leptospirosis pada tahun 2017 adalah 10,5 per 100.000 penduduk, meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu 7,9 per 100.000 penduduk. Angka kematian leptospirosis tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016 yaitu 4,09% dibanding 5,47%. Upaya-upaya komprehensif dalam rangka pencegahan dan penanggulangan leptospirosis telah dilakukan. Hal ini meliputi sosialisasi penyakit leptospirosis, koordinasi lintas sektor dan program, peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam tatalaksana kasus leptospirosis serta peningkatan surveilans leptospirosis sebagai upaya kewaspadaan dini dan respon terhadap penyakit potensial kejadian luar biasa dan wabah. Faktor yang mempengaruhi peningkatan angka kasus adalah sebagian besar penduduk Kabupaten Bantul yang bermata pencaharian sebagai petani yang

merupakan kelompok beresiko terkena penyakit leptospirosis dan terjadinya banjir di akhir tahun.

d) Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS

Angka prevalensi HIV-AIDS sampai tahun 2017 sebesar 0,09%, terjadi peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar 0,083%. Angka ini menunjukkan endemisitas kasus HIV termasuk baik, jauh lebih rendah dibandingkan target sebesar 0,5%. Kasus HIV-AIDS banyak ditemukan pada kelompok umur 20-59 tahun. Akselerasi pengendalian HIV-AIDS dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok beresiko rendah (Bumil, penderita TB) dan pada kelompok potensial (umur 15-24 tahun), dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus, peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV pada kelompok potensial, serta dilakukan pengendalian Pencegahan Penularan Ibu Anak (PPIA) dengan cara konseling dan tes HIV pada semua ibu hamil. Untuk mendukung upaya-upaya tersebut dilakukan penambahan jumlah layanan konseling dan tes HIV di sembilan Puskesmas di Kabupaten Bantul, sehingga sampai akhir tahun 2017 terdapat 26 Puskesmas layanan dan tiga RS (RSUD Panembahan Senopati, RSPAU Harjolukito, dan RS Respira) sebagai layanan KT HIV, enam Puskesmas Layanan Infeksi Menular Seksual (IMS), satu Puskesmas Pelayanan Rumatan Metadon (PTRM), satu Puskesmas Pengobatan Dukungan Perawatan/PDP (Puskesmas Kretek) dan dua RS PDP (RSUD dan RS Hardjolukito).

e) Imunisasi

Imunisasi dasar lengkap pada bayi merupakan salah satu upaya pencegahan penyakit menular yang

dapat mengakibatkan kematian bayi. Kabupaten Bantul pada tahun 2017 telah mencapai status *Universal Child Immunization* 100%, yaitu seluruh desa di wilayah Kabupaten Bantul telah memenuhi standar imunisasi pada bayi. Imunisasi lanjutan dalam Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dilakukan pada anak usia sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3. Kabupaten Bantul telah memenuhi standar nasional cakupan BIAS yaitu tahap I dengan antigen Measles and Rubella (MR) sebesar 98,64% serta tahap II dengan antigen Difteri dan Tetanus (DT) sebesar 97,83% dan Td (Antigen DT dengan setengah dosis untuk antigen Difteri) sebesar 98,11%. Seluruh tahapan ini telah melampaui target nasional yaitu 95%.

Pada tahun ini, Kabupaten Bantul juga telah melaksanakan *crash programme* nasional pemberian imunisasi Measles and Rubella (MR) dengan capaian 98,25% melampaui target nasional yaitu 95%.

f) Kewaspadaan Dini dan Respon terhadap Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah

Fungsi utama surveilans penyakit adalah sebagai bentuk kewaspadaan dini dan respon terhadap potensial KLB dan wabah. Surveilans yang baik meliputi fungsi pencegahan agar tidak terjadi kasus KLB, fungsi tata laksana untuk menekan potensi penyebaran, angka kesakitan dan angka kematian, serta fungsi manajemen komunikasi resiko dalam hal memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada *stakeholder* terkait dan seluruh masyarakat.

Tahun 2017 telah terantisipasi 14 kasus kejadian potensial KLB di wilayah Kabupaten Bantul dengan tujuh di antaranya adalah kasus keracunan makanan. Langkah-langkah penyelidikan epidemiologi telah dilaksanakan

kurang dari 24 jam sebagai respon dini untuk menekan tingkat keparahan serta memperpendek episode kejadian. Secara istimewa, pada tahun ini juga Kabupaten Bantul telah mengantisipasi dugaan kasus antraks dan difteri di awal dan akhir tahun secara berurutan. Kedua kasus ini telah dinyatakan negatif KLB.

Fungsi *Rapid Health Assessment* (RHA) sebagai respon cepat pencegahan penyakit juga telah dilakukan pada saat masa tanggap darurat bencana antara lain bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang terjadi pada tanggal 28 November 2017. Berdasarkan keputusan Bupati Nomor 352 Tahun 2017 tentang Status Siaga Darurat Banjir, Tanah Longsor, Dan Angin Kencang, diberlakukan kondisi tanggap darurat bencana pada tanggal 29 November s.d 12 Desember 2017. Jumlah penduduk terdampak bencana sebanyak 12.096 jiwa di 17 kecamatan pada 55 desa dengan korban jiwa sebanyak tiga orang. Hasil RHA pada lokasi pengungsian warga di beberapa titik bencana dengan rincian pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
 Hasil *Rapid Health Assessment* pada
 Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor,
 dan Angin Kencang Tahun 2017

No.	Kecamatan	Bangunan Roboh (Titik)	Banjir	Erosi (Titik)	Angin Kencang (Titik)	Tanah Longsor (Titik)	Jumlah Terdampak (Jiwa)
1	Srandakan				1		250
2	Sanden				5		27
3	Kretek		3				960
4	Pundong		1			2	956
5	Bambanglipuro		1		5		848
6	Pandak				2		158
7	Bantul				3	1	64
8	Jetis		1				899
9	Imogiri		3			1	4488
10	Dlingo					3	224

No.	Kecamatan	Bangunan Roboh (Titik)	Banjir	Erosi (Titik)	Angin Kencang (Titik)	Tanah Longsor (Titik)	Jumlah Terdampak (Jiwa)
11	Pleret		1		3	3	1485
12	Piyungan				1	1	1153
13	Banguntapan			2			5
14	Sewon		1	1	4	1	517
15	Kasih	1		1		1	30
16	Pajangan		2			3	26
17	Sedayu					1	6
	JUMLAH	1	13	4	24	17	12.096

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Penilaian kesehatan secara cepat ini sebagai kewaspadaan dini potensial penyakit yang terjadi pada korban-korban bencana sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan dan tata laksana untuk menekan angka kesakitan bahkan angka kematian pada warga korban bencana. Penilaian kondisi lingkungan juga dilaksanakan untuk mencegah terjadinya perubahan dampak lingkungan akibat bencana terhadap kesehatan masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan berdasarkan hasil RHA adalah:

- Pelayanan kesehatan dan pemberian tindakan darurat medis maupun rujukan.
- Kewaspadaan terhadap penyakit pasca banjir dipantau sampai dengan 3 bulan paska kejadian (atau sampai dengan musim hujan berakhir) yaitu: Penyakit kulit, leptospirosis, ISPA, Diare, hepatitis A, dan DBD.
- Pemberian Makanan Tambahan (PMT) *buffer* pada Balita dan ibu hamil berupa biskuit PMT sebanyak 215 dus untuk Balita dan 82 dus untuk ibu hamil.
- Observasi dan pendataan sanitasi dampak bencana serta pendistribusian bahan dan peralatan sanitasi seperti kaporit, tawas, dan penjernih air cepat (PAC).

Tabel 4.13
Tindakan Upaya Perbaikan Kesehatan Lingkungan pada Sumur yang
Terdampak Bencana Tahun 2017

No.	Kecamatan	Tindakan/Sasaran	Jumlah
1	Sanden	- penyedotan/pengurasan sumur	250
		- klorinasi (pemberian kaporit) pada sumur	272
2	Kretek	- penyedotan/pengurasan sumur	80
		- klorinasi (pemberian kaporit) pada sumur	92
3	Pundong	- penyedotan/pengurasan sumur	29
		- klorinasi (pemberian kaporit) pada sumur	29
		- distribusi plastik sampah besar	100 buah
		- droping air bersih	1 tangki
4	Bambanglipuro	- penyedotan/pengurasan sumur	385
		- klorinasi (pemberian kaporit) pada sumur	385
5	Imogiri	- penyedotan/pengurasan sumur	2.448
		- klorinasi (pemberian kaporit) pada sumur	2.569
		- distribusi plastik sampah besar	100 buah
		- distribusi air bersih	12 tangki
6	Pleret	- penyedotan/pengurasan sumur	28
		- klorinasi (pemberian kaporit) pada sumur	28
		- distribusi plastik sampah besar	
7	Piyungan	- penyedotan/pengurasan sumur	205
		- klorinasi (pemberian kaporit) pada sumur	206
		- distribusi lysol	
8	Sewon	- penyedotan/pengurasan sumur	16
		- klorinasi (pemberian kaporit) pada sumur	50
		- distribusi plastik sampah besar	
9	Kasihan	- penyedotan/pengurasan sumur	8
		- klorinasi (pemberian kaporit) pada sumur	14
10	Pajangan	- pengurasan sumur (swadaya masyarakat)	
11	Sedayu	- penyedotan/pengurasan sumur	3
		- klorinasi (pemberian kaporit) pada sumur	3
		- distribusi lysol, alat pel	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

8) Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini didukung oleh dana APBD yang terdiri dari DAK sebesar Rp1.339.626.000,00 dan DAU sebesar Rp42.540.000,00. Hasil penilaian akreditasi Puskesmas

sebanyak 27 Puskesmas telah terakreditasi, disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14
Penilaian Akreditasi Puskesmas Tahun 2017

No.	Puskesmas	2015	2016	2017	Keterangan
1.	Pajangan		✓		Paripurna
2.	Pleret		✓		Utama
3.	Piyungan		✓		Utama
4.	Banguntapan II		✓		Utama
5.	Srandakan		✓		Madya
6.	Sanden		✓		Madya
7.	Pundong		✓		Madya
8.	Bantul I		✓		Madya
9.	Imogiri I		✓		Madya
10.	Bambanglipuro	✓			Madya
11.	Jetis I		✓		Dasar
12.	Jetis II	✓			Dasar
13.	Kasihani I			✓	Utama
14.	Pandak I			✓	Utama
15.	Pandak II			✓	Utama
16.	Kretek			✓	Utama
17.	Bantul II			✓	Utama
18.	Imogiri II			✓	Madya
19.	Dlingo I			✓	Madya
20.	Dlingo II			✓	Utama
21.	Sewon I			✓	Madya
22.	Sewon II			✓	Utama
23.	Sedayu I			✓	Madya
24.	Sedayu II			✓	Madya
25.	Banguntapan I			✓	Status belum ditetapkan Komisi Akreditasi
26.	Banguntapan III			✓	Status belum ditetapkan Komisi Akreditasi
27.	Kasihani II			✓	Status belum ditetapkan Komisi Akreditasi

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah pengembangan Puskesmas, yaitu:

a) Pengembangan Pelayanan Unggulan

Sebagian besar Puskesmas telah memiliki layanan unggulan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di wilayah kerja Puskesmas (Tabel 4.15).

Tabel 4.15
 Puskesmas dengan Layanan Unggulan
 Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Tahun 2017

No.	Puskesmas	PONED	Integrasi Kesehatan Jiwa	Kesehatan Mata (Pelayanan Spesialis)	PTRM & layan ODHA	Klinik IMS, VCT, Konsel HIV	PKPR	Yankes-tradkom	KTPA	Layanan Psiko-logi	Poli Sore	Gadar Wisata
1	Srandakan	v				v	v			v		
2	Sanden	v				v	v			v	v	
3	Kretek				v	v	v			v		v
4	Pundong					v						
5	Bambanglipuro					v	v					
6	Pandak I											
7	Pandak II										v	
8	Bantul I					v					v	
9	Bantul II										v	
10	Jetis I					v	v					
11	Jetis II		v							v		
12	Imogiri I	v		v		v	v			v		
13	Imogiri II		v				v	v			v	
14	Dlingo I	v				v						
15	Dlingo II						v			v		
16	Pleret					v	v	v				
17	Piyungan	v				v						
18	Banguntapan I										v	
19	Banguntapan II	v	v		v	v	v			v		
20	Banguntapan III					v						
21	Sewon I	v										
22	Sewon II					v						
23	Kasih I									v		
24	Kasih II		v			v		v				
25	Pajangan		v			v			v			
26	Sedayu I	v				v						
27	Sedayu II											

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

Keterangan:

- PONED : Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar
- PTRM : Pelayanan Terapi Rumatan Metadon
- ODHA : Orang Dengan HIV AIDS
- IMS : Infeksi Menular Seksual
- VCT : Voluntary Conceling and Testing
- PKPR : Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
- KTPA : Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
- Gadar : Gawat Darurat
- Yankestradkom : Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

Standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dilakukan melalui penetapan kelas dan Akreditasi rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Penetapan kelas dan status akreditasi rumah sakit disajikan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16
Kelas Rumah Sakit Tahun 2017

No.	Rumah Sakit	Kelas	Akreditasi
1	RSUD Panembahan Senopati	B	Akreditasi
2	RSPAU dr. Suradji Hardjolutito	B	Akreditasi
3	RSU PKU Muhammadiyah	C	Akreditasi
4	RSU Patmasuri	D	Akreditasi
5	RSU Nur Hidayah	D	Akreditasi
6	RSU Santa Elizabeth	D	Akreditasi
7	RSU Permata Husada	D	-
8	RSU Rahma Husada	D	Akreditasi
9	RSU Rajawali Citra	D	Akreditasi
10	RSU Griya Mahardika	C	-
11	RSK Ibu dan Anak Ummi Kasanah	C	-
12	RSK Bedah Ringroad Selatan	C	Akreditasi
13	RSK Paru Respira	C	-
14	RSK Ibu dan Anak Adinda	C	-
15	RSK Ibu dan Anak Kahyangan	C	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

b) Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)

Pengembangan SIK berbasis komputerisasi telah dilakukan di semua Puskesmas, dilengkapi dengan perangkat keras berupa komputer *server*, komputer *client*, dan jaringan, serta perangkat lunak yang digunakan yaitu sistem *e-Health* ataupun *Integrated Health Information System* (IHIS) di 27 Puskesmas. Beberapa Puskesmas juga mengembangkan anjungan pendaftaran mandiri, sehingga makin mempercepat antri pendaftaran pasien.

9) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin ini didukung oleh dana APBD sebesar Rp17.296.460.000,00 yang digunakan untuk pembiayaan kesehatan peserta Jamkesda. Jumlah peserta Jamkesda pada tahun 2017 sebanyak 85.803 jiwa. Pada tahun 2017 telah dilakukan integrasi peserta Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai peserta PBI APBD sebanyak 23.500 jiwa..

Program ini memberikan dampak terhadap penanganan masalah kesehatan yaitu biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, rentan miskin dan kriteria tertentu yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Kriteria tertentu yang mendapat Jamkesda adalah GTT/PTT, kader kesehatan, kaum rohaniwan Islam, relawan dan orang-orang yang berjasa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang sosial dan kemasyarakatan.

10) Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

Program ini didukung dengan anggaran sebesar Rp15.902.077.500,00 yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan dan generator untuk seluruh Puskesmas sesuai kebutuhan, serta mobil ambulan di Puskesmas Pundong, Pleret, Imogiri II, Sedayu II, dan Dinkes.

Perluasan gedung Puskesmas telah dilaksanakan pada Puskesmas Dlingo II, Piyungan, Sewon I, Pajangan dan Bambanglipuro serta Puskesmas Pembantu Nitipuran di wilayah Puskesmas Kasihan II.

11) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan didukung oleh dana APBD sebesar Rp758.980.000,00. Dana tersebut untuk penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:

a) Pendampingan Jamkesda

Kegiatan pendampingan Jamkesda bertujuan untuk operasional pelaksanaan UPT Jamkesda. Penduduk Bantul yang tercakup pelayanan Jamkesda sebanyak 109.303 jiwa yang terdiri dari 85.803 jiwa peserta Jamkesda dan 23.500 jiwa sebagai Penerima Bantuan Iur (PBI) pada BPJS dari APBD Kabupaten Bantul.

b) Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Kegiatan kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan terdiri dari dua sub kegiatan pokok yaitu jaminan kesehatan dan kemitraan. Sub kegiatan jaminan kesehatan meliputi beberapa jenis penyelenggaraan jaminan kesehatan dari berbagai sumber biaya. Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan sebanyak 866.981 jiwa (93,09%).

Tabel 4.17
Data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2017

No.	Jenis Jaminan	Jumlah Peserta (jiwa)
1	Jaminan Kesehatan Nasional	
1.1.	Penerima Bantuan Iur (PBI)	
	a. APBN	497.485
	b. PBI APBD	23.500
1.2	Non PBI	77.432
	a. PNS	59.807
	b. TNI/Polri	17.728
	c. Pejabat Negara	161
	d. Pegawai Pemerintah Non PNS	5.064
	e. BUMN BUMD	547
	f. Swasta Lainnya	63.386
	g. Bukan pegawai	33.461
	h. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	69.989
2	Jamkesta	
	a. Jamkesta Maskin	4.323
	b. Jamkesus (Khusus Difabel)	5.726
3	Jamkesda	85.803
	Jumlah Penduduk mempunyai Jaminan Kesehatan	866.980
	Jumlah Penduduk Bantul	931.356
	Cakupan Jaminan Kesehatan	93,09%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Pada sub kegiatan kemitraan, Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan menjalin kerjasama dengan beberapa mitra dari Institusi pendidikan, rumah sakit, LSM, lintas sektor, Puskesmas, sekolah sehat, klinik, dan bidan praktik mandiri.

Tabel 4.18
Kemitraan Dinas Kesehatan dengan Institusi

No.	Mitra	Jumlah
1	Institusi Pendidikan	34
2	Rumah Sakit	32
3	Klinik, BPM	34
4	LSM	3
5	Puskesmas	27
6	Sekolah Sehat	7
7	Lintas Sektor	2
TOTAL		139

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

12) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) serta pelayanan dan penyuluhan kesehatan anak Balita. Program ini didukung dana APBD II sebesar Rp35.000.000,00. Dukungan APBD Provinsi DIY sebesar Rp16.093.750,00 dan APBN sebesar Rp5.530.000,00.

Kesehatan bayi di Kabupaten Bantul sudah cukup baik yang ditandai dengan rendahnya Angka Kematian Bayi (AKB). Upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK), meningkatkan keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat serta dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Capaian indikator proses dalam program ini antara lain:

- a) Cakupan *neonatal* dengan komplikasi yang ditangani sebesar 83% yaitu sebanyak 1.519 dari 1.831 *neonatal* yang mengalami komplikasi.
- b) Cakupan pelayanan anak Balita sebesar 73,10%. Pelayanan anak Balita ini mencakup 42.393 Balita dari seluruh Balita yang ada sebanyak 58.032 Balita.

Keterpaduan program perbaikan gizi meliputi peningkatan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif bagi bayi sampai umur enam bulan sebesar 74,85% menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar 75,04% dan pemberian PMT bagi Balita gizi buruk.

KP-Ibu bertujuan untuk memotivasi ibu hamil dalam melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada saat melahirkan sehingga mendorong peningkatan pemberian ASI eksklusif. Capaian indikator Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2017 sebesar 8,32 pada tahun 2017, terjadi peningkatan dibanding tahun 2016 sebesar 7,83 per 1.000 kelahiran hidup, lebih rendah dari target 8,75 per 1.000 kelahiran. Pada tahun 2017 terdapat 102 bayi meninggal dari 12.818 kelahiran hidup.

13) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia ini didukung dana APBD sebesar Rp107.000.000,00. Pelaksanaan program ini antara lain dengan memasyarakatkan pentingnya kesehatan preventif pada kelompok usia lanjut dan pemeliharaan kesehatan dengan melakukan olah raga yang teratur serta pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang serta kegiatan sosialisasi SPM tentang pelayanan kesehatan lansia yaitu lansia mendapatkan pelayanan skreening kesehatan sesuai standar yang akan mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut telah terbentuk Posyandu Lansia sejumlah 937 unit.

Untuk dukungan layanan kesehatan Lansia maka seluruh Puskesmas telah santun Lansia, dan Puskesmas santun Lansia strata II sejumlah tiga Puskesmas, yaitu Puskesmas Kasihan II, Banguntapan II, dan Piyungan.

Jumlah ini sudah mencapai target Puskesmas santun Lansia sebanyak tiga Puskesmas pada tahun 2017.

Secara kelembagaan, Komisi Daerah (Komda) Lansia merupakan mitra pemerintah dalam kegiatan kesehatan bagi kelompok usia lanjut. Lembaga ini aktif dalam melakukan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan usia lanjut.

Kerjasama dan dukungan dari berbagai *stakeholder* telah berhasil meningkatkan umur harapan hidup. Berdasarkan data dari BPS, usia harapan hidup pada tahun 2011 sebesar 71,33 tahun, naik menjadi 71,34 tahun pada tahun 2012, dan tahun 2013 menjadi 71,40 tahun, serta pada tahun 2014 menjadi 71,62 tahun, selanjutnya pada tahun 2015 menjadi 73,24 tahun, dan pada tahun 2016 menjadi 73,44 tahun.

14) Peningkatan dan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program peningkatan dan keselamatan ibu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Dukungan dana APBD sebesar Rp1.810.650.000,00 yang terdiri dari DAK sebesar Rp1.645.150.000,00 untuk Jaminan Persalinan (Jampersal) serta APBD Provinsi DIY sebesar Rp16.250.000,00.

Program ini dijalankan melalui peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas maupun RS, pengembangan jejaring kemitraan lintas program dan lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kader kesehatan untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan serta sumber daya manusia.

Upaya penurunan kasus kematian ibu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan pelaksanaan *Antenatal*

Care (ANC) terpadu dan berkualitas di Puskesmas, Kelompok Pendukung (KP) ibu yang sudah diintegrasikan dengan Kelas Ibu, membentuk jejaring dan sistem rujukan, dan peningkatan Puskesmas mampu PONEID, peningkatan kapasitas dokter dan bidan, penyediaan pembiayaan jaminan persalinan. Capaian indikator proses dalam program ini antara lain:

- a) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 85,76% yaitu sebanyak 11.521 ibu hamil melakukan kunjungan minimal empat kali ke pelayanan kesehatan dari seluruh sasaran yang ada sejumlah 13.434 ibu hamil;
- b) Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani sebesar 92% yaitu sebanyak 2468 dari 2684 ibu hamil yang mengalami komplikasi;
- c) Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 86,68% yaitu sejumlah 11.110 ibu dari seluruh persalinan tahun 2017 sebanyak 12.818 ibu bersalin;
- d) Cakupan pelayanan ibu nifas sebesar 83,24% yaitu 10.669 dari sasaran ibu nifas sebanyak 12.818 ibu;
- e) Cakupan peserta KB aktif sebesar 69,2% yaitu sejumlah 105.410 Pasangan Usia Subur (PUS) dari seluruh sasaran PUS sebanyak 152.365 pasangan. Angka ini lebih rendah dari target nasional sebesar 70%. Cakupan unmet need tahun 2017 sebesar 8,85%.

Upaya mempercepat penurunan kematian ibu memerlukan keterpaduan lintas program, yaitu program perbaikan gizi masyarakat, khususnya pada ibu hamil melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 300 ibu hamil, program pencegahan penyakit, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui penyiapan masyarakat dalam desa siaga, ambulan desa, dan donor

darah. Capaian angka kematian ibu pada tahun 2017 sebesar 73,4 per 100.000 kelahiran hidup (9 kasus kematian ibu), lebih rendah atau lebih baik daripada target kematian ibu 87,5 per 100.000 kelahiran hidup.

Penyebab kematian ibu adalah karena adanya perdarahan sebanyak dua kasus, infeksi dua kasus dan Pre Eklampsia Berat (PEB) satu kasus, serta penyebab lain-lain sebanyak empat kasus (infeksi paru-paru, hipertiroid, dan *unclassified*).

15) Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa

Program ini didukung dana APBD sebesar Rp.546.567.000,00. Program ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular serta mencegah dan mengendalikan masalah kesehatan jiwa. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular ditujukan pada penyakit yang timbul akibat pola atau gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, kurang aktifitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kurang istirahat dan stress. Pola hidup tersebut dapat memicu timbulnya penyakit-penyakit degeneratif yaitu hipertensi, Diabetes Mellitus (DM), Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD), stroke, gagal ginjal, dan keganasan (kanker). Angka kejadian penyakit tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 dari seluruh penyebab kematian karena penyakit, 57% akibat PTM, dan diperkirakan angka tersebut akan meningkat setiap tahunnya.

Di sisi lain, berbagai kondisi sosial memicu peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa baik gangguan jiwa berat maupun gangguan mental emosional. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa berat dengan

ditemukannya penderita baru sebanyak 427 orang, kasus lama 5.172 kasus. Untuk gangguan mental emosional pada tahun 2017 ditemukan kasus baru sebanyak 701, kasus lama 554. Untuk kejadian bunuh diri di tahun 2017 ada 4 kasus.

Dalam rangka mengendalikan peningkatan jumlah penderita penyakit tidak menular dan pengendalian peningkatan kasus masalah Kesehatan Jiwa (Keswa) tersebut, telah dilakukan upaya yang meliputi sosialisasi program PTM dan Keswa, *update knowledge* PTM dan masalah Keswa, validasi data PTM dan Keswa, pelatihan kader Posbindu PTM, pelatihan kader Keswa, seminar PTM, dan *Workshop Community Mental Health Nurshing* (CMHN). Kegiatan tersebut bertujuan untuk peningkatan kapasitas petugas kesehatan, kader Posbindu PTM, dan kader kesehatan jiwa dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan masalah kesehatan jiwa di masyarakat.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular yang bertujuan melakukan *screening* awal faktor risiko DM dan PJPD.

c. Permasalahan dan solusi

Permasalahan dan solusi terkait dengan pelaksanaan program dalam urusan kesehatan disajikan pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19
Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Kesehatan

No.	Permasalahan	Solusi
1	Kasus gizi buruk meningkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pemanfaatan bahan makanan lokal sebagai solusi peningkatan biaya belanja bahan makanan yang mengurangi daya beli masyarakat untuk pemenuhan gizi seimbang; 2. Peningkatan pemberian pendidikan kesehatan mengenai PHBS dan pola asuh bagi masyarakat; 3. Peningkatan kualitas penggiatan ASI eksklusif pada masyarakat.
2	Angka penemuan kasus TB di bawah target	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta dari layanan kesehatan swasta dalam penemuan TB melalui supervisi oleh wasor TB/<i>district officer</i> TB, dan pengelola program

No.	Permasalahan	Solusi
		HIV; 2. Kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat: - Kolaborasi dengan PD Aisyiyah - Revitalisasi Gerakan Terpadu Daerah (Gerduda) Kecamatan 3. Penyediaan ruang tersendiri untuk poli batuk dan TB MDR di Puskesmas; 4. Pendampingan penemuan TB di Puskesmas melalui kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan fokus pada: - Penyegaran tentang strategi DOTS; - <i>Active Selective Case Finding</i> (ASCF) melalui pemeriksaan dahak pada suspek; - Pemberian makanan tambahan pada penderita TB yang sedang diobati.
3	Penyakit Tidak menular dan Kesehatan Jiwa	1. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan usia produktif dengan membentuk Posbindu Institusi di kantor dan tempat pendidikan 2. Memberikan edukasi pada masyarakat tentang masalah kesehatan jiwa dan penanganannya 3. Mengusulkan formasi tenaga psikolog untuk Puskesmas

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, pelayanan dasar yang diutamakan adalah air minum, kawasan kumuh, dan sanitasi. Prioritas tersebut untuk mewujudkan *Universal Access 2019* (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% layanan sanitasi). Hal ini perlu didukung melalui kebijakan, program, dan kegiatan di daerah. Urusan pekerjaan umum dilaksanakan melalui beberapa program/kegiatan yang akan diuraikan di bawah ini.

Ruang dapat diartikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan termasuk di dalamnya ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sebagai suatu sistem, penataan ruang merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang diperlukan agar manusia terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemanfaatan ruang yang tidak teratur, seperti kesemrawutan transportasi, berkembangnya kawasan kumuh, dan masalah lingkungan lainnya.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga terwujud keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dengan adanya penataan ruang yang baik diharapkan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah dapat lebih terkendali dan berwawasan lingkungan.

a. Program Yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan dalam urusan pekerjaan umum pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 2) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya;
- 3) Pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan drainase/gorong-gorong;
- 4) Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
- 5) Pembangunan infrastruktur perdesaan;
- 6) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- 7) Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya;
- 8) Program pengendalian banjir;
- 9) Perencanaan tata ruang;
- 10) Pengendalian pemanfaatan ruang.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

- 1) Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan agar fungsi jalan menjadi optimal sehingga diharapkan dapat meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, serta perekonomian masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp54.768.480.000,00, melalui kegiatan sebagai berikut:

a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Kegiatan ini meliputi penggantian jembatan Bayuran dan jembatan Beji, serta untuk menangani pemeliharaan jalan kabupaten sebanyak 56 ruas sepanjang 119,4 km yang tersebar di seluruh Kabupaten Bantul.

b) Peningkatan jalan kabupaten

Kegiatan ini meliputi peningkatan jalan sebanyak 30 ruas sepanjang 33 km.

Total panjang jaringan jalan kabupaten (beraspal) dalam kondisi mantap menjadi 452,10 km (74,18%) dari 609,44 km, naik dari tahun sebelumnya sepanjang 341,22 km pada tahun 2016.

2) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program ini bertujuan untuk mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp46.075.630.000,00, melalui kegiatan sebagai berikut:

a) Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, meliputi:

- (1) DED peningkatan/pemeliharaan jaringan irigasi wilayah barat,
- (2) DED peningkatan/pemeliharaan jaringan irigasi wilayah timur,

- (3) Inventarisasi dan pendataan afvour kawasan DAS Oyo dan sekitarnya,
 - (4) Inventarisasi dan pendataan afvour kawasan DAS Progo, Bedog, dan sekitarnya,
 - (5) DED rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi wilayah barat,
 - (6) DED rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi wilayah timur,
 - (7) DED rehabilitasi dan pemeliharaan afvour wilayah barat,
 - (8) DED rehabilitasi dan pemeliharaan afvour wilayah timur,
 - (9) DED pembangunan/rehabilitasi bendung tetap,
 - (10) DED rehabilitasi/pembangunan bendung gerak,
 - (11) UKL-UPL DI Pendowo (kawasan jalan Jenderal Sudirman),
 - (12) Inventarisasi potensi embung Kabupaten Bantul,
 - (13) Studi restorasi Sungai Opak, Winongo, dan Bedog.
- b) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- Hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- (a) Saluran irigasi sepanjang 7.421,33 m;
 - (b) Saluran pembuang sepanjang 873 m;
 - (c) Sayap Bendung (pasangan batu) sepanjang 234 m;
 - (d) Sayap Bendung (bronjong) sepanjang 60,50 m;
 - (e) Talud pengaman saluran irigasi sepanjang 65,60 m;
 - (f) Bangunan irigasi sebanyak delapan unit;
 - (g) Pintu air (ulir) sebanyak dua unit.
- c) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya meliputi:

- (1) Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi ada 33 DI yang meliputi:
- (a) DI Pendowo dan penanganan kawasan jalan Jendral Sudirman (Desa Bantul, Kecamatan Bantul);
 - (b) DI Sono Kretek (Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek);
 - (c) DI Kenalan (Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan);
 - (d) DI Mojo (Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan);
 - (e) DI Balong (Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul);
 - (f) DI Tundan (Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan);
 - (g) DI Miri I (Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon);
 - (h) DI Bayem (Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan);
 - (i) DI Salakan (Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan);
 - (j) DI Kemiri (Kecamatan Sewon);
 - (k) DI Malangjiwan (Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon);
 - (l) DI Pranti (Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan);
 - (m) DI Koripan (Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo);
 - (n) DI Kembang (Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo);
 - (o) DI Seropan (Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo);
 - (p) DI Canden (Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri);
 - (q) DI Dokaran (Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon);
 - (r) DI Karangploso (Kecamatan Piyungan);
 - (s) DI Miri II (Kecamatan Sewon);

- (t) Saluran Irigasi Bongos (Kecamatan Sanden);
 - (u) Saluran Irigasi Jaten di Desa Triharjo (Kecamatan Pandak);
 - (v) Saluran Irigasi Singosaren (Kecamatan Banguntapan);
 - (w) Saluran Irigasi Kepanjen di Desa Jambidan (Kecamatan Banguntapan);
 - (x) Saluran Santan di Desa Jambidan (Kecamatan Banguntapan);
 - (y) Saluran Irigasi Combongan di Desa Jambidan (Kecamatan Banguntapan);
 - (z) Saluran Irigasi Dusun Balakan (Kecamatan Jetis);
 - (aa) Saluran Irigasi Bulak Timur Dusun Barongan (Kecamatan Jetis);
 - (bb) Saluran Irigasi Dusun Plebengan Desa Sidomulyo (Kecamatan Bambangliupuro);
 - (cc) DI Putat (Kecamatan Pundong);
 - (dd) Saluran Irigasi Kecamatan Jetis;
 - (ee) Saluran Irigasi Tegal di Desa Tamanan (Kecamatan Banguntapan);
 - (ff) Saluran Irigasi Banguntapan I (Kecamatan Banguntapan);
 - (gg) Saluran Irigasi Banguntapan II (Kecamatan Banguntapan);
- (2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi, pada lokasi berikut:
- a) DI Merdiko (Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon);
 - b) DI Ewon (Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak);
 - c) DI Tengah (Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan);

- d) DI Jotawang (Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon);
 - e) DI Kadisono (Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul);
 - f) DI Karangploso (Desa Bawuran/Segoroyoso, Kecamatan Pleret);
 - g) DI Mejing (Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro);
 - h) DI Pacar (Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret);
 - i) DI Klegen (Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong);
 - j) DI Sindet (Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri).
- (3) Rehabilitasi dan pembangunan pelengkap irigasi bangunan ukur dan *pailscale* di UPT BWK, UPT Winongo, dan UPT Opak Oyo sebanyak 95 unit:
- (a) DI Kadisono (Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak);
 - (b) DI Ewon (Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak);
 - (c) DI Samas (Desa Srigading, Kecamatan Sanden);
 - (d) DI Demen (Desa Sedangsari, Kecamatan Pajangan);
 - (e) DI Beji (Desa Sedangsari, Kecamatan Pajangan);
 - (f) DI Gunung Kunci (Desa Tirtoharjo, Kecamatan Krertek);
 - (g) DI Mejing (Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro);
 - (h) DI Merdiko (Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon);

- (i) DI Klegen (Desa Pajangrejo, Kecamatan Pundong);
- (j) DI Timbulsari (Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon);
- (k) DI Mojo (Desa Donotirto, Kecamatan Kretek);
- (l) DI Balong (Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul);
- (m) DI Gempolan (Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul);
- (n) DI Kemiri (Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul);
- (o) DI Karang (Desa Tirtoharjo, Kecamatan Kretek);
- (p) DI Karangploso (Desa Pleret, Kecamatan Pleret);
- (q) DI Nglaren (Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan);
- (r) DI Pranti 1 (Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan);
- (s) DI Pranti 2 (Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan);
- (t) DI Salakan (Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan);
- (u) DI Mergoyoso (Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan);
- (v) Tuk Ngembong (Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan);
- (w) DI Canden (Desa Patalan, Kecamatan Jetis);
- (x) DI Gatak (Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis);
- (y) DI Tegal (Desa Srihardono, Kecamatan Pundong);
- (z) DI Sorowajan (Panggunharjo, Sewon)
- (aa) DI Koripan (Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo);

- (bb) DI Kajor (Desa Selopamiro, Kecamatan Dlingo).
- (4) Rehabilitasi gorong-gorong sebanyak 8 unit di:
 - (a) DI Kadisono (Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak);
 - (b) DI Kajor (Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri);
 - (c) DI Mejing (Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro);
 - (d) DI Klegen (Desa Pajangrejo, Kecamatan Pundong);
 - (e) DI Dokaran (Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon);
 - (f) DI Bugelwaru (Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek);
 - (g) DI Merdiko (Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon);
 - (h) DI Tegal (Desa Srihardono, Kecamatan Pundong).
- (5) Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air di UPT BWK, UPT Winongo, dan UPT Opak-Oyo sebanyak 26 unit.
- (6) Rehabilitasi saluran penguras dan pembuang irigasi tiga DI di:
 - (1) DI Salakan (Desa Jambidan, Kecamatan Banguntapan);
 - (2) DI Tengah (Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan);
 - (3) DI Grojogan (Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan).
- (7) Rehabilitasi ringan bendung, rumah pelindung, rumah jaga bendung dan papan operasi tujuh DI di:
 - (a) DI Beji II (Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan);

- (b) DI Tintang (Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis);
 - (c) DI Sewon (Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon);
 - (d) DI Gunung Kunci (Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek);
 - (e) DI pacar (Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis);
 - (f) DI Bugelwaru (Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek);
 - (g) DI Mojo (Desa Donotirto, Kecamatan Kretek).
- (8) Pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan secara swakelola di lima UPT pengamatan.

d) Pengelolaan Jaringan Irigasi untuk:

- (1) Memberdayakan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) termasuk di dalamnya Komisi Irigasi (Komir), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A)/Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), dan unsur yang terkait dengan irigasi. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan peran GP3A dalam pengelolaan irigasi di tingkat jaringan primer dan sekunder.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi (Loan) sepanjang 2.355,50 m dilaksanakan melalui kontraktual yang berlokasi di:
 - (a) DI Dokaran (Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon);
 - (b) DI Merdiko (Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon);
 - (c) DI Candan (Desa Karangtalun, Kecamatan Imogiri);
 - (d) DI Ewon (Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak).
- (3) Perencanaan, meliputi:
 - (a) Desain Partisipatif

- UPT Opak Hilir dan UPT Opak Hulu (DI Salakan dan DI Terong);
- UPT BWK dan UPT Winongo (DI Tengah dan DI Gempolan).

(b) Pengelolaan Aset Irigasi

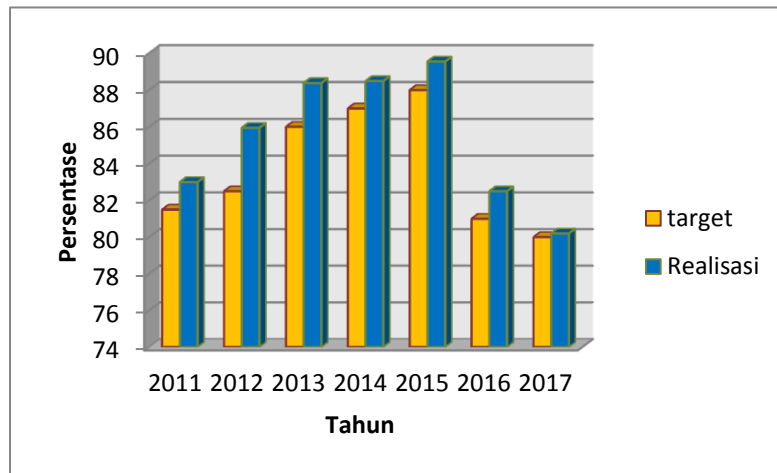
- UPT Opak Hilir (DI Canden dan DI Jotawang);
- UPT Opak Hulu (DI Karangasem dan DI Ketonggo Bibis);
- UPT BWK (DI Widodo dan DI Kadisono);
- UPT Winongo (DI Kemiri dan DI Balong).

Program WISMP dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan GP3A. Melalui program ini target kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tahun 2017 (DI kewenangan Kabupaten Bantul) adalah 80% (188.071,20 m) dan terealisasi 80,20% (188.541,38 m) atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,20%. Data target dan capaian saluran irigasi dalam kondisi baik selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2011-2017 dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20
Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik tahun 2011-2017

Tahun	Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik			
	Target (m)	%	Realisasi (m)	%
2011	335.232,24	81,50	341.402,17	83,00
2012	339.345,52	82,50	353.550,97	85,95
2013	353.741,99	86,00	365.460,06	88,38
2014	181.523,40	87,00	184.632,25	88,49
2015	183.521,40	88,00	186.754,37	89,55
2016	190.422,09	81,00	193.957,00	82,50
2017	188.071,20	80,00	188.541,38	80,20

Sumber: DPUPKP, 2018



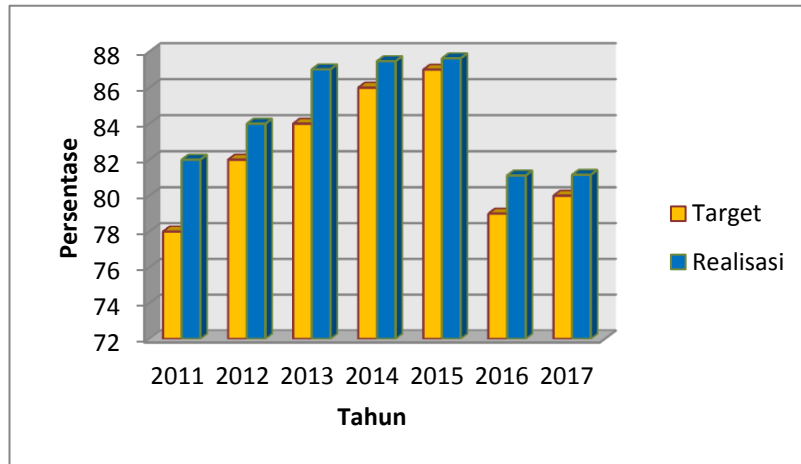
Grafik 4.2
Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik tahun 2011-2017

Melalui program ini, target luas sawah DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantul yang terairi dengan baik sebesar 80% (6.907,20 ha) dan terealisasi sebesar 81,16% (7.007,35 ha) atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 1,16%. Data target dan capaian DI kewenangan Kabupaten Bantul yang terlayani air irigasi selama tujuh tahun terakhir dari tahun 2011-2017 dapat dilihat pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21
Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2011-2017

Tahun	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bantul Yang Terairi Dengan Baik			
	Target (Ha)	%	Realisasi (Ha)	%
2011	5.380,44	78,00	5.656,36	82,00
2012	5.656,36	82,00	5.794,32	84,00
2013	5.794,32	84,00	6.002,64	87,02
2014	7.425,24	86,00	7.552,16	87,47
2015	7.511,58	87,00	7.565,97	87,63
2016	6.820,86	79,00	7.004,00	81,12
2017	6.907,20	80,00	7.007,35	81,16

Sumber: DPUPKP, 2018



Grafik 4.3
Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi
Tahun 2011-2017

3) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Program ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi jalan kabupaten yang dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan drainase/gorong gorong dengan anggaran Rp2.430.010.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah terbangunnya 17 talud jalan dan penggantian gorong-gorong ruas jalan Pedes-Kemusuk Lor.

4) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memperluas cakupan pelayanan air bersih, air limbah, dan drainase sehingga dapat menanggulangi kerawanan air, pencemaran lingkungan dan genangan air hujan dengan anggaran Rp16.594.250.000,00. Keluaran program ini adalah:

a) Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dengan anggaran sebesar Rp10.153.250.000,00 meliputi:

(1) Pembangunan IPAL komunal sebanyak lima unit di Bantul, Bambanglipuro, Imogiri, dan Pundong.

- (2) Sambungan Rumah (SR) air limbah terpusat di tiga kecamatan yaitu Sewon, Banguntapan, dan Kasihan sebanyak 227 SR dan pengadaan tangki septik individual di Kecamatan Sedayu sebanyak 32 unit.
- (3) Pembangunan saluran drainase/air hujan di 23 lokasi tersebar di Kabupaten Bantul.

b) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dengan anggaran sebesar Rp5.998.822.000,00 meliputi:

- (1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM):
 - (a) Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Dlingo (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/SRM-Unit Pelayanan);
 - (b) Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Pajangan (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/SRM-Unit Pelayanan);
 - (c) Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Kasihan (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/SRM-Unit Pelayanan);
 - (d) Peningkatan Cakupan Layanan SPAM Sedayu (Pipa PVC, GIP, HDPE-Unit Distribusi, Sambungan Rumah Murah/SRM-unit pelayanan);
 - (e) SPAM Kecamatan Sewon;
 - (f) SPAM Kecamatan Bantul.
- (2) Penyediaan sambungan rumah enam unit di Kecamatan Jetis, Kasihan, Pajangan, Bantul, Piyungan, dan Dlingo.

5) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyediakan sarana-prasarana aksesibilitas wilayah dan

fasilitas perdagangan di wilayah perdesaan. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp43.375.091.821,00 meliputi:

- a) Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan berupa pembangunan jalan desa sebanyak 27 ruas dari dana APBD Kabupaten dan tujuh ruas dari dana BKK Propinsi DIY sepanjang 31,71 km;
- b) Pembangunan prasarana dan sarana utilitas berupa corblok jalan lingkungan sebanyak 10 paket di Kecamatan Jetis, Imogiri, dan Dlingo yang bersumber dari dana BKK Propinsi DIY;
- c) Perencanaan *showroom* OVOP pasar lama Imogiri;
- d) Bantuan stimulan pembangunan perumahan swadaya sebanyak 557 unit.

6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatkan sarana-prasarana perkantoran bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp11.993.619.312,00 meliputi:

- a) Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor:
 - (1) Rehab Kantor Kecamatan Pleret, Piyungan, Sewon, Sedayu, Dlingo, Sanden, Bambanglipuro, Kretek, Kasihan, dan Jetis;
 - (2) Pembangunan Ruang Arsip dan rehab ruang rapat Dinas DPUPKP;
 - (3) Pembangunan Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul;
 - (4) Pemel prasarana wisata Mancingan.
- b) Pengadaan/rehabilitasi kendaraan dinas/operasional;
- c) Pemeliharaan rumah dan gedung kantor;
- d) Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;
- e) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.

7) Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber air dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya dengan anggaran sebesar Rp1.095.000.000,00. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

(a) Pemeliharaan dan Rehabilitasi embung dan Bangunan Penampung air lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung kepada masyarakat di 10 lokasi, yaitu:

- (1) Balai Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon;
- (2) Balai Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan;
- (3) Balai Desa Pleret, Kecamatan Pleret;
- (4) Balai Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan;
- (5) Balai Desa Patalan, Kecamatan Jetis;
- (6) Balai Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret;
- (7) Balai Desa Srihardono, Kecamatan Pundong;
- (8) Balai Desa Pleret, Kecamatan Pleret;
- (9) Balai Desa Bawuran, Kecamatan Pleret;
- (10) Balai Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pembangunan embung sebagai berikut:

- (1) Pembangunan Embung Mojo (Dusun Grogol 8, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek);
- (2) Pembangunan Embung Randu (Dusun Duwuran, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek);

- (3) Pembangunan Embung Randu 2 (Dusun Duwuran, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek);
 - (4) Pembangunan Embung Sambirejo (Desa Sambirejo, Kecamatan Pundong);
 - (5) Pembangunan Embung Soko (Dusun Soko, Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong);
 - (6) Pembangunan Dodogan (Dusun Dodogan, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo);
 - (7) Pembangunan Semuten (Dusun Semuten, Desa Jatimulyo, Kecamatan Dlingo);
 - (8) Pembangunan Tuk Duren (Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo);
 - (9) Pembangunan Lemah Bang (Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo);
 - (10) Pembangunan Wunut (Kecamatan Imogiri).
- (b) Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air

Kegiatan ini dilaksanakan dengan:

- (1) Melakukan inspeksi ke 17 kecamatan terkait dengan kelestarian fungsi jaringan irigasi dan pelanggaran pembuatan bangunan di atas jaringan irigasi.
- (2) Melaksanakan fluktuasi air tanah dangkal setiap bulan di 17 kecamatan padasumur pantau air tanah dangkal.
- (3) Pembuatan dan pemasangan papan larangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Pasal 13 Ayat (1) Huruf c tentang larangan pengotoran dan perusakan kelestarian fungsi air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan lainnya yang dapat merugikan lingkungan sebanyak 30 buah, yang dipasang pada saluran

irigasi dan sekitar sungai dengan lokasi sebagai berikut:

- (a) Dusun Sumberan, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan;
- (b) Dusun Sonopakis, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan;
- (c) Dusun Sonopakis, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan;
- (d) Dusun Tundan, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan;
- (e) Dusun Kadisono, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan;
- (f) Dusun Kenalan, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan;
- (g) Dusun Gangin, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan;
- (h) Dusun Bayem 1, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan;
- (i) Dusun Bayem 2, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan;
- (j) Dusun Kembanggede, Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan;
- (k) Dusun Mojo, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek;
- (l) Dusun Tegal Sari, Desa Donotirto, Kecamatan Kretek;
- (m) Dusun Giren, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro;
- (n) Dusun Klegen, Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong;
- (o) Dusun Bakulan, Desa Patalan, Kecamatan Jetis;
- (p) Dusun Pepe, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul;

- (q) Dusun Tembi, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon;
- (r) Dusun Bangi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon;
- (s) Dusun Sawit, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon;
- (t) Dusun Gabusan, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon;
- (u) Dusun Grojogan, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan;
- (v) Dusun Donoloyo, Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan;
- (w) Dusun Genengan, Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan;
- (x) Dusun Brajan, Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret;
- (y) Dusun Kempul, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan;
- (z) Dusun Balong, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan;
- (aa) Dusun Banjardadap, Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan;
- (bb) Dusun kertopaten, Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan;
- (cc) Dusun Singosaren, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon;
- (dd) Dusun Tanjung, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon.

8) Pengendalian Banjir

Program pengendalian banjir mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Program ini

dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp11.455.880,00 meliputi:

a) Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai. Kegiatan yang dilaksanakan adalah perkuatan tebing dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Peningkatan (membuat baru) tebing sungai sepanjang 1.201,49 m;
- (2) Perbaikan (rehabilitasi) tebing sungai sepanjang 98,10 m;
- (3) Bangunan 1 unit;
- (4) Perkuatan tebing sungai sebanyak 19 paket yang terdiri dari:
 - (a) Perkuatan Tebing Sungai Winongo Lama (Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek);
 - (b) Perkuatan Tebing Sungai Bulus (Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis);
 - (c) Perkuatan Tebing Sungai Konteng (Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan);
 - (d) Perkuatan Tebing Sungai Belik (Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret);
 - (e) Perkuatan Tebing Sungai Kedung Semerangan (Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan);
 - (f) Perkuatan Tebing Sungai Widuri (Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan);
 - (g) Perkuatan Tebing Sungai Widuri (Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan);
 - (h) Perkuatan Tebing Sungai di Desa Guwosari (Kecamatan Pajangan);
 - (i) Perkuatan Tebing Sungai Tegalsari Banguntapan (Kecamatan Banguntapan)
 - (j) Perkuatan Tebing Sungai Mruwe (Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan);

- (k) Perkuatan Tebing Sungai Mruwe (Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan);
 - (l) Perkuatan Tebing Sungai Gawe (Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan);
 - (m) Perkuatan Tebing Sungai Kuning (Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan);
 - (n) Perkuatan Tebing Sungai Celeng (Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri);
 - (o) Perkuatan Tebing Sungai Celeng (Desa Karangtengah, Kecamatan Imogiri);
 - (p) Perkuatan Tebing Sungai Celeng (Girirejo) (Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri);
 - (q) Perkuatan Tebing Sungai Pesing Bawuran Pleret (Kecamatan Pleret);
 - (r) Perkuatan Tebing Sungai Plilan Selopamioro Imogiri (Kecamatan Imogiri);
 - (s) Perkuatan Tebing Sungai di Desa Selopamioro (Kecamatan Imogiri);
 - (t) Perkuatan Tebing Sungai Celeng (Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri).
- (5) Peningkatan (membuat baru) afvour sepanjang 2.000,45 m;
 - (6) Rehabilitasi (perbaikan) afvour sepanjang 296,85 m;
 - (7) Bangunan sebanyak empat unit;
 - (8) Pintu angkat sebanyak satu unit.
 - (9) Peningkatan afvour sebanyak 18 paket pada lokasi:
 - (a) Afvour Jigudan (Desa Triharjo, Kecamatan Pandak);
 - (b) Afvour Daleman (Desa Gadingharjo, Kecamatan Sanden);
 - (c) Afvour Krekah (Kali Lanang) (Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro);

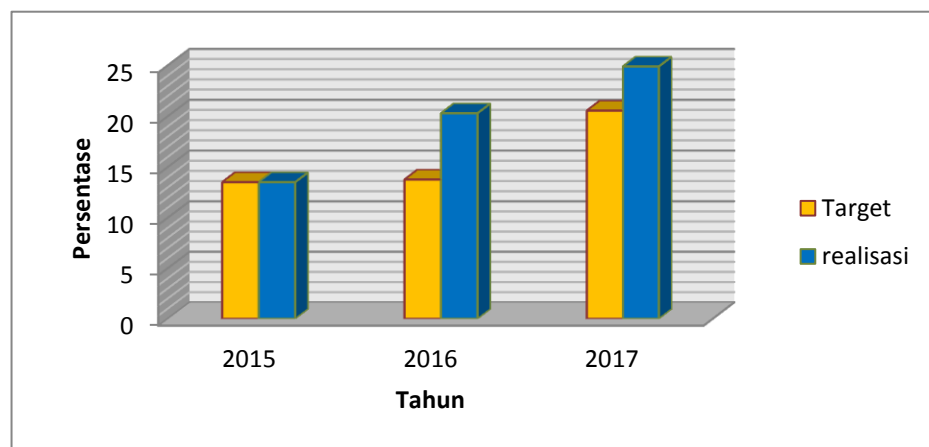
- (d) Afvour Tekekan (Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro);
- (e) Afvour Busuran (Desa Donotirto, Kecamatan Kretek);
- (f) Afvour Colo (Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong);
- (g) Afvour Buruhan (Desa Tirtosari, Kecamatan Kretek);
- (h) Afvour Kojo (Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon);
- (i) Afvour Silir/Bedog (Desa Donotirto, Kecamatan Kretek);
- (j) Afvour Gulon (Desa Srihardono, Kecamatan Pundong);
- (k) Afvour Grogol (Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek);
- (l) Afvour Ngetuk (Desa Srihardono, Kecamatan Pundong);
- (m) Afvour Barjoyo (Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong);
- (n) Afvour Bobok Tempel Pundong (Kecamatan Pundong)
- (o) Afvour Semampir Pundong (Kecamatan Pundong).

Program tersebut bertujuan untuk menangani potensi banjir dari sungai dan afvour akibat curah hujan tinggi. Pada tahun 2017 target penanganan banjir sebesar 20,56% atau 183,71 ha dan terealisasi 24,90% atau seluas 222,49 ha (Tabel 4.22).

Tabel 4.22
Penanganan Banjir
Tahun 2015-2017

No.	Tahun	Target		Realisasi	
		Penanganan Banjir (Ha)	%	Penanganan Banjir (Ha)	%
1	2015	120,80	13,52	120,80	13,52
2	2016	123,13	13,78	181,43	20,30
3	2017	183,71	20,56	222,49	24,90

Sumber: DPUPKP, 2017



Grafik 4.4
Persentase Penanganan Banjir Tahun 2015-2017

9) Perencanaan Tata Ruang

Di dalam program ini pada tahun 2017 hanya terdapat satu kegiatan yaitu kegiatan penyusunan rencana tata ruang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana tata ruang sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul. Sebagaimana diamanatkan dalam Permen PU Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, dokumen rencana tata ruang perlu dilengkapi dengan peraturan zonasi.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp1.100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp1.025.579.497,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a) RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Bambanglipuro;
- b) RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Dlingo;
- c) KLHS Kecamatan Bambanglipuro;
- d) KLHS Kecamatan Dlingo;
- e) Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Piyungan;
- f) Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Pansela;
- g) Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Jetis;
- h) Penyusunan Raperda RDTR dan PZ Pundong;
- i) Desain Citra Kota Bantul Jalan Jendral Sudirman.

Hasil dari program ini bermanfaat sebagai instrumen *advice planning* operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

10) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Program ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp231.000.000,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a) Kajian platform layanan dinas;
- b) Kajian kematangan masyarakat;
- c) Aplikasi broadcast;
- d) Pengawasan yang tertangani sebanyak 545 bidang.

c. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dan solusi pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada Tabel 4.23.

Tabel 4.23
Permasalahan dan Solusi dalam Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Permasalahan	Solusi
1	Sarana jalan dan saluran irigasi banyak mengalami kerusakan yang diakibatkan adanya cuaca ekstrem	Pemeliharaan dan peningkatan jalan dan saluran irigasi
2	Kemampuan untuk mencapai target <i>universal access</i> tahun 2019 belum maksimal	Percepatan target dengan pembangunan sarana prasarana dasar
3	Prasarana jalan lingkungan banyak mengalami kerusakan	Memberdayakan pemerintah desa melalui ADD dan mendorong swadaya masyarakat.
4	Pemenuhan fasilitas umum/fasilitas sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi fasilitas umum/ fasilitas sosial yang sudah ada - Terpenuhinya persentase fasilitas umum/fasilitas sosial pada kawasan perumahan
5	Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai perwujudan ruang yang nyaman belum terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada - Merencanakan pengadaan kekurangannya agar dapat memenuhi persyaratan 20% RTH publik dan 10% RTH privat dari luas wilayah
6	Pengaturan ruang belum mengantisipasi terhadap pertumbuhan infrastruktur, teknologi informasi, penduduk dan ekonomi	Menambah elemen analisis dengan memasukkan unsur-unsur kemiskinan dan trend perkembangan teknologi di masa yang akan datang

Sumber: DPUPKP dan DPTR Kabupaten Bantul, 2018

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan terhadap penangan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara kewenangan pemerintah kabupaten antara lain penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman, penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha.

Kebijakan pembangunan perumahan selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, juga untuk mengatasi *backlog* rumah dan mengurangi kawasan kumuh perkotaan. Pada tahun 2017, rumah tidak layak huni dapat tertangani 557 unit dari dana BKK Pemda DIY.

a. Program yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Program pengembangan perumahan;
- 2) Program pengelolaan areal pemakaman.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

1) Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan dilaksanakan dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah susun sehat sederhana menggunakan anggaran sebesar Rp3.104.163.500,00. Keluaran dari program ini adalah:

- a) Operasional empat unit rusunawa, yaitu Rusunawa Panggunharjo, Rusunawa Ngestiharjo, Rusunawa Banguntapan, dan Rusunawa Tamanan;
- b) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung Rusunawa Banguntapan yaitu pembangunan pos Satpam dan *landscape*; dan
- c) Penataan kawasan kumuh di Pedukuhan Pacetan, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, untuk mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bantul.

2) Pengelolaan Areal Pemakaman

Pesatnya pembangunan perumahan tidak sebanding dengan ketersediaan pemakaman umum. Hal ini memicu terjadinya permasalahan konflik sosial antara warga perumahan dengan masyarakat sekitar. Program ini dilaksanakan melalui pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dengan anggaran sebesar Rp1.125.000.000,00 yang bertujuan untuk menyediakan areal pemakaman umum di Kecamatan Imogiri. Penyediaan pemakaman umum merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan

pemakaman khususnya bagi masyarakat yang tinggal di perumahan.

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan beberapa permasalahan dan solusi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman (lihat Tabel 4.24).

Tabel 4.24
Permasalahan dan Solusi dalam Urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Permasalahan	Solusi
1	Masih terdapat kawasan permukiman kumuh perkotaan	Pencegahan dan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kawasan kumuh perkotaan
2	Keterbatasan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah dalam mengakses perumahan layak huni	Fasilitasi hunian untuk MBR
3	Belum tersedianya tempat pemakaman umum	Percepatan pembangunan pemakaman umum
4	Masih terdapat kawasan permukiman kumuh perkotaan	Pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kawasan kumuh perkotaan

Sumber: DPTR, 2018

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah: “tentram ialah aman atau tidak rusuh, tidak dalam kekacauan, misalnya di daerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang atau tidak gelisah, tenang hati, pikiran. Selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.”

Berdasarkan kedua pengertian di atas terdapat keterkaitan yang erat di mana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala

peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu di mana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

J.S Badudu dan Z.M Zain mendefinisikan bahwa: “ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan”.

Berdasarkan definisi di atas pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku, menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan.

Ermaya Suradinata mendefinisikan bahwa: “ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan di antaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan”.

a. Program yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 2) Program pemeliharaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan pencegahan tindak kriminal;
- 3) Program peningkatan ketertiban dan keamanan;
- 4) Program penegakan peraturan daerah.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Indikator kinerja utama yang berkaitan dengan urusan ini adalah: (1) Persentase Penegakan Perda dan (2) Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan (K3). Program yang mendukung tercapainya IKU tersebut adalah:

- 1) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp298.860.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp281.260.150,00 atau sebesar 94%. Indikator kinerja program ini adalah rasio Linmas dengan RT, dengan target 96% pada tahun 2017, tercapai 95,3%, yaitu jumlah Linmas sebanyak 5.001 dan jumlah RT sebanyak 5.775. Kegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut:

- a) Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp113.180.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp110.599.150,00. Keluaran dari kegiatan ini adalah pelatihan wawasan kebangsaan bagi anggota Linmas di 17 kecamatan.

- b) Pemberdayaan Linmas

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp183.680.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp170.661.000,00. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan Linmas dalam pelaksanaan HUT Sat Pol PP dan Linmas, dan Posko Siaga Bencana.

2) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Indikator kinerja program ini adalah cakupan pelanggaran Kantrantibmas yang ditindaklanjuti. Adapun capaian indikator tersebut adalah 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keluaran program ini adalah kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp312.070.000,00 dan realisasi sebesar Rp297.850.000,00 atau 95,44%. Kegiatan patroli wilayah dilaksanakan sebanyak tiga kali sehari. Hal ini dilakukan untuk menjaga Kantrantibmas di Wilayah Kabupaten Bantul serta untuk menertibkan pelanggaran Perda yang ada. Pengamanan dilaksanakan terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta tamu ataupun kegiatan organisasi masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan pengamanan.

3) Peningkatan Ketertiban dan Keamanan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp327.270.000,00 dan realisasi sebesar Rp239.334.00 atau 73%. Kurang maksimalnya realisasi ini dikarenakan dalam kegiatan ini terdapat anggaran/dana cadangan yang digunakan untuk penanganan konflik. Anggaran ini digunakan jika terdapat konflik, seperti demonstrasi dan kerusuhan. Tetapi pada kenyataannya, di tahun 2017 tidak dijumpai adanya demonstrasi dan atau kerusuhan yang memerlukan penanganan aparat pemerintah sehingga dana yang tersedia tidak terpakai.

Indikator Kinerja Program ini adalah Cakupan Kawasan Tertib dengan target capaian sampai tahun 2017 adalah 14 Kawasan. Target ini tercapai 100%, dengan kawasan sebagai berikut:

- (1) Gose - Bejen
- (2) Bejen - Kweden
- (3) Gose - Klodran
- (4) Gose - Jetak
- (5) Klodran - Jonggrangan
- (6) Klodran - Manding
- (7) Manding - Bakulan
- (8) Klodran - Kasongan
- (9) Palbapang - Gilangharjo
- (10) Sidomulyo - Mulyodadi
- (11) Mulyodadi - Srigading
- (12) Gilangharjo - Sumbermulyo
- (13) Sepanjang Jalan Wahidin Sudiro Husodo
- (14) Depan Pasar Imogiri Baru.

4) Penegakan Perda

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp208.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp194.270.000,00 atau 93%. Indikator kinerja program ini adalah cakupan pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti dengan capaian tahun 2017 sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah:

a) Operasi Penegakan Perda

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp144.980.000,00 dan realisasi sebesar Rp135.140.000,00. Upaya-upaya yang dilakukan dalam kegiatan ini antara lain operasi yustisi dan non yustisi terhadap pelanggaran Perda. Dari target 120 kali operasi terlaksana 100%.

b) Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian

Kegiatan ini dilaksanakan dengan anggaran Rp63.920.000,00 dan realisasi sebesar Rp59.130.000,00 atau 94,6%. Output dari kegiatan ini adalah:

- (1) Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi sebanyak 3 kali.
- (2) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan Narkoba sebanyak 4 kali.
- (3) *Workshop* pengembangan kapasitas PPNS dan Trantib sebanyak 4 kali.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bantul dan solusinya dalam urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat disajikan npada Tabel 4.25.

Tabel 4.25
Permasalahan dan solusi dalam urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat

No.	Permasalahan	Solusi
1	Dalam rangka memenuhi rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan Rukun Tetangga (RT), terkendala masih kurangnya penghargaan terhadap keberadaan Linmas, sehingga minat untuk menjadi anggota Linmas masih kurang. Sementara anggota Linmas yang masih berusia muda belum dapat secara permanen menjadi anggota. Hal ini karena dituntut kebutuhan ekonomi yang mendorong mereka untuk pindah domisili	Memberdayakan anggota Linmas yang ada dan melaksanakan pembinaan pada anggota Linmas
2	Dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, kendala yang dihadapi adalah:	
	- Kurangnya kesadaran masyarakat pada pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
	- Kurangnya koordinasi dan komitmen antar instansi	Mengoptimalkan peran PPNS yang ada
3	Dalam Penegakan Perda, hambatan yang dihadapi adalah:	
	- Kurangnya personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah	Pengajuan usulan personil yang memenuhi kualifikasi PPNS

No.	Permasalahan	Solusi
	- Masyarakat kurang mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah	Sosialisasi secara informal pada masyarakat langsung

Sumber: Satpol PP, 2018

6. Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dengan tujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Di Kabupaten Bantul, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Sosial dengan program-program yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meskipun demikian, penanganan permasalahan sosial menjadi tanggungjawab tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia swasta. Selain penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

a. Program yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan dalam urusan Sosial selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan alokasi anggaran APBD murni sebesar Rp614.142.500,00;
- 2) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan alokasi anggaran APBD murni sebesar Rp2.056.271.000,00;
- 3) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan alokasi anggaran APBD murni sebesar Rp499.900.000,00;
- 4) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda dengan alokasi anggaran APBD murni sebesar Rp230.000.000,00;
- 5) Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan alokasi anggaran APBD murni sebesar Rp228.210.000,00;

b. Realisasi Pelaksanaan Program

- 1) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini didukung anggaran pada APBD murni sebesar Rp614.142.500,00 yang kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar Rp603.608.500,00. Dari anggaran tersebut terdapat efisiensi sebesar Rp43.049.300,00 sehingga total penyerapan anggaran adalah sebesar Rp560.559.200,00 atau 92,86%. Meskipun demikian capaian kegiatan fisik mencapai 100% dengan keluaran berupa:

- a) Sosialisasi PMKS;
- b) pemberdayaan lanjut usia potensial;
- c) penanganan jenazah terlantar;

- d) pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal;
- e) pelayanan dan penanganan anak putus sekolah dan anak berhadapan dengan hukum;
- f) koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan penanganan permasalahan Lansia.

Hasil yang dapat dilihat dari program ini adalah meningkatnya pelayanan rehabilitasi bagi PMKS, meningkatnya mentalitas anak yatim menjadi anak yang lebih mandiri dan berakhlak mulia, meningkatnya keterlibatan lanjut usia potensial dalam usaha kesejahteraan sosial, terselenggaranya penanganan jenazah terlantar, meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian bagi PMKS anak, berkurangnya permasalahan anak putus sekolah dan anak berhadapan dengan hukum, dan meningkatnya peran aktif SKPD dalam penanganan permasalahan Lansia.

Selanjutnya keluaran atau kegiatan dari program ini secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

a) Sosialisasi PMKS

Kegiatan ini menyerap anggaran Rp53.700.000,00 yang dilaksanakan selama 7 hari pada triwulan I dengan jumlah peserta 210 orang. Adapun rinciannya sebagaimana disajikan pada Tabel 4.26.

b) Razia Anjal, Gepeng, dan Psikotik lainnya

Kegiatan ini menyerap anggaran Rp54.750.000,00 yang dilaksanakan bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Bantul dan Sat Sabhara Polres Bantul, sebanyak 12 kali dari tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan 8 Desember 2017, mendapatkan 42 orang dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 4.27.

Tabel 4.26
Sosialisasi PMKS

No.	Tanggal kegiatan	Tempat	Peserta	Keterangan
1	24-25 Februari 2017	Pedukuhan Nglaren, Desa Potorono, Kec. Banguntapan	60 orang	PMKS Anjal dan Gepeng
2	3-5 Maret 2017	Panti Sosial Hafara, Desa Bangunjiwo, Kec. Sewon	90 orang	PMKS anak terlantar dan tunawisma
3	20-21 Maret 2017	Dinsos P3A Kabupaten Bantul	60 orang	PSK

Sumber: Satpol PP, 2018

Tabel 4.27
Razia Anjal, Gepeng, dan Psikotik

No.	Jenis PMKS	Jumlah	Asal	
			Bantul	Luar Bantul
1	Anak Jalanan	31	3	28
2	Gelandangan/Pengemis	6	4	2
3	Psikotik	5	1	4
4	Lainnya	0	0	0
Total		42	8	34

Sumber: Satpol PP, 2018

c) Peningkatan SDM Panti

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp44.500.000,00 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2017 di LKS Amanah Trimulyo Bantul dengan jumlah peserta 50 orang yang terdiri dari pengurus-pengurus 26 Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial.

d) Penjangkauan TRC Kabupaten Bantul

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp67.450.000,00 yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2017 di Polres Bantul dengan jumlah peserta 150 orang yang terdiri dari aparat Satpol PP dan Sat Sabhara Polres Bantul.

e) Penjangkauan PMKS

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Bantul berupa mengantar dan menjemput klien

ke/dari rumah sakit/panti rehab, seperti RSJ Ghrasia Pakem, RSD Dr. Soedjarwadi Klaten, Panti Margo Laras pati, dan lain-lain. Selama tahun 2017 telah mengantar dan menjemput klien (mayoritas psikotik) sebanyak 76 kali. Anggota TRC mendapatkan honor Rp150.000,- per bulan selama 12 bulan.

f) Pemakaman Jenazah Terlantar

Untuk kegiatan pemakaman jenazah terlantar tahun 2017, Pemerintah Daerah menyiapkan dana untuk 40 jenazah (Rp1.445.000,00 per jenazah), yang digunakan untuk perawatan dan pemakamannya. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pemakaman sebanyak 20 jenazah terlantar.

g) Pelayanan Jamkesmas

Pelaksanaan program Jamkesmas di Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Bapeljamkesmas DIY sebanyak empat kali, dengan jumlah target sebanyak 2000 orang yang tercakup dalam program Jamkesmas.

h) *Workshop* Lansia dan HLUN

Pelaksanaan *workshop* Lansia sebanyak 100 orang dilaksanakan dua kali. HLUN dilaksanakan dengan kegiatan senam bugar lansia dengan peserta ssebanyak 1000 orang dan puncak acara HLUN sebanyak 500 orang.

i) Permakanan Panti-Panti

Dinas Sosial P3A memberikan fasilitas berupa konsumsi kepada panti/LKS untuk kegiatan panti/LKS di tahun 2017 yang diberikan kepada 24 Panti.

j) Permakanan Panti Hafara

Pemberian konsumsi untuk kegiatan panti Hafara sebesar Rp20.520.000,00.

2) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya

Dengan mendayagunakan SDM dana sebesar Rp2.056.271.000,00, yang kemudian dilaksanakan dengan anggaran perubahan sebesar Rp2.024.079.400,00 program ini menghasilkan keluaran berupa peningkatan kerampilan usaha bagi PMKS, peningkatan pendapatan keluarga, sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan bantuan bagi keluarga miskin meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), distribusi Raskin, Kelompok Usaha Bersama (Kube), dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Adapun hasil yang nyata adalah terlaksananya distribusi bantuan kepada masyarakat penerima secara tepat waktu dan tepat sasaran. Keluaran dari program ini secara rinci adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan Kapasitas SDM Pendampingan Sosial Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan/pelatihan ketrampilan dengan anggaran perubahan sebesar Rp858.540.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp838.348.250,00 dengan capaian fisik sebesar 100%. Realisasi kegiatannya adalah sebagai berikut:

- (1) Kegiatan *family gathering* sebanyak 50 orang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2017 di taman Kaliurang;
- (2) Kegiatan pelatihan ketrampilan bagi LU potensial sebanyak 60 orang;

- (3) Kegiatan pelatihan ketrampilan bagi keluarga rentan sosial sebanyak 200 orang;
- (4) Kegiatan pembinaan keluarga penerima dana ASLUT/ASODK sebanyak 543 orang;
- (5) Kegiatan pelatihan ketrampilan PMKS sebanyak 200 orang;
- (6) Kegiatan pelatihan ketrampilan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma;
- (7) Kegiatan pembinaan dan motivasi usaha bagi klien panti;
- (8) Kegiatan pelatihan ketrampilan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
- (9) Kegiatan pelatihan tanggap darurat bencana bagi difabel.

Dari kegiatan pelatihan-pelatihan tersebut yang diberikan perlengkapan bahan praktek adalah:

- (1) Pelatihan bagi LU potensial sebanyak 60 orang;
- (2) Pelatihan ketrampilan bagi keluarga rentan sosial sebanyak 200 orang;
- (3) Pelatihan ketrampilan bagi PMKS sebanyak 200 orang;
- (4) Pelatihan ketrampilan eks trauma sebanyak 30 orang;
- (5) Pelatihan ketrampilan ABK sebanyak 50 orang;
- (6) Pelatihan klien panti (PSKW dan PSBR) sebanyak 40 orang.

b) Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan PMKS

Kegiatan ini dalam rangka membuat rekomendasi layanan kesehatan dan menyiapkan data kepesertaan jaminan kesehatan keluarga miskin Kabupaten Bantul di tahun 2017, dengan tujuan yaitu pelayanan rekomendasi jaminan kesehatan bagi warga Bantul yang sakit/dirawat, mempersiapkan data

kepesertaan jaminan kesehatan, menganalisis permasalahan PMKS sebagai bahan pertimbangan penyusunan data kepesertaan jaminan kesehatan. Dengan anggaran Rp238.677.000,00 dan anggaran perubahan sebesar Rp235,577,000 dapat melakukan efisiensi dengan total anggaran yang digunakan sebesar Rp234.270.000,00 dengan capaian fisik 100%. Dengan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Membuatkan rujukan layanan kesehatan dengan pelaksanaan 2 Januari s.d 29 desember 2017;
- (2) Entry data kepesertaan jaminan kesehatan dengan pelaksanaan tanggal 2 Januari s.d 29 Desember 2017;
- (3) Memberikan pelayanan pengaduan terkait dengan warga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dengan pelaksanaan tanggal 2 Januari s.d 29 Desember 2017.

c) Sosialisasi Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan bagi Bantuan Warga Miskin

Merupakan kegiatan pendampingan bagi bantuan sosial dari Kementrian Sosial Republik Indonesia antara lain kegiatan program Rasta, PKH, KUBE, PKH, KUBE FM, dan pendampingan bantuan sosial dari APBD Kabupaten Bantul antara lain bantuan sosial WRSE serta PKH dan bantuan sosial Rutilahu. Tujuan kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi, pelaksanaan pengendalian, dan pengawasan bantuan agar sampai kepada warga miskin sebagai sasaran program. Kegiatan ini menggunakan dana anggran sebesar Rp933.812.400,00 dengan realisasi sebesar Rp933.807.840,00. Serapan anggarannya adalah 100% dan capaian fisik sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatannya sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan Rastra

Sosialisasi Rastra dengan menghadirkan tim koordinasi Rastra tingkat kabupaten, camat, lurah dan TKSK dilaksanakan di gedung pertemuan Pemda II Manding. Monitoring distribusi Rastra selama 12 bulan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 97.472 KPM dan masing-masing KPM mendapatkan 15 Kg. Rapat koordinasi dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan sekali. Rapat evaluasi tahunan Rastra dan sekaligus memperkenalkan sekilas tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

- (2) Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan PKH

Sosialisasi PKH di 17 kecamatan dengan mengundang servis provider baik desa, dukuh, layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Monitoring pembayaran tiap triwulan baik melalui ATM BNI maupun lewat layanan Bis Layanan Gerak (BLG). Monitoring pelaksanaan validasi tambahan kepesertaan PKH. Rapat Koordinasi dengan Korwil, Korkab, operator dan Korcam, operator dan semua pendamping dilaksanakan setiap bulan sekali. Pelaksanaan kunjungan kerja PKH baik Korwil, Korkab, Korcam, operator ke Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dengan peserta PKH tahun 2008, 2009 dan 2013 serta pelaksanaan PKH Kabupaten. Pengadaan komputer desktop dan printer sebanyak 17 unit untuk menunjang operasional pendampingan di 17 kecamatan. Jumlah bantuan PKH tahun 2017 dari kementerian sosial RI sebesar Rp115.223.740.000,00.

- (3) Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan KUBE

Penyuluhan pengembangan KUBE PKH di lima kecamatan penerima KUBE, yaitu Sewon, Sanden, Imogiri, Dlingo, dan Kasihan. Sementara itu, penyuluhan pengembangan KUBE fakir miskin dilaksanakan di Kecamatan Jetis.

Monitoring pelaksanaan KUBE PKH *Quick Wins* tahun 2017 yang merupakan bantuan dari kementerian Sosial RI ada di Kecamatan Pandak untuk 10 kelompok dan di Kecamatan Banguntapan untuk 22 kelompok. Monitoring pelaksanaan KUBE fakir miskin dana Dekon tahun 2017 di Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul, untuk dua kelompok dan Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, untuk delapan kelompok.

- (4) Sosialisasi, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Bantuan WRSE Peserta PKH

Verifikasi calon penerima Bansos WRSE peserta PKH di lima kecamatan yang meliputi Pandak, Jetis, Pundong, Sedayu, dan Bambanglipuro. Bantuan sosial WRSE peserta PKH tahun 2017 dari anggaran Kabupaten Bantul sebanyak 50 orang, masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp1.000.000,00.

- (5) Sosialisasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bantuan Rutilahu peserta PKH

Verifikasi calon penerima bansos Rutilahu di tiga kecamatan yang meliputi Pandak, Pleret, dan Imogiri. Bantuan sosial Rutilahu tahun 2017 dari anggaran Kabupaten Bantul sebanyak 53 orang,

masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp10.000.000,00.

(6) Sosialisasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bantuan pemasangan listrik

Verifikasi calon penerima bansos pemasangan listrik di sembilan kecamatan yang meliputi Bangalipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Pajangan, Pandak, Sanden, dan Srandakan. Bantuan sosial pemasangan listrik tahun 2017 dari anggaran Kabupaten Bantul sebanyak 104 orang, masing-masing mendapatkan bantuan Rp1.000.000,00.

3) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini didukung dengan dana sejumlah Rp499.900.000,00 dengan anggaran perubahan sebesar Rp458.215.000,00 dan menghasilkan keluaran berupa peningkatan kualitas SDM lembaga sosial dan peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional. Hasil yang dapat dirasakan adalah adanya organisasi sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berprestasi sampai tingkat propinsi dan nasional serta tumbuhnya jiwa kesetiakawanan sosial melalui kegiatan jalan sehat dan sarasehan. Keluaran dari program ini secara rinci adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat

Kegiatan dalam program ini dimaksudkan untuk pemberdayaan Organisasi Sosial (Orsos) dan PSM di Kabupaten Bantul. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah melalui pembinaan dan mekanisme lomba/evaluasi, mereka dituntut peran maksimal sehingga *outputnya* dapat dirasakan oleh masyarakat. Kegiatan ini dengan anggaran sebesar

Rp429.900.000,00 dengan anggaran perubahan sebesar Rp388.215.000,00 efisiensi sebesar Rp376.230.000,00 dengan capaian fisik 100%.

Penyelenggaraan kegiatan pemilihan Orsos, PSM, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) berprestasi dimulai dari seleksi di tingkat kecamatan pada bulan Februari s.d Maret 2017 dengan peserta 35 orang se-Kabupaten Bantul. Hasil terbaik tingkat kecamatan diajukan ke tingkat kabupaten. Seleksi di tingkat Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Maret 2017 dengan hasil sebagai berikut:

(1) Orsos berprestasi:

- (a) Nominasi I: LKS/LKSA Gotong royong, Jaranan, Panggunharjo, Sewon, yang kemudian mewakili ke tingkat Provinsi melalui evaluasi tingkat provinsi. Hasil evaluasi tingkat provinsi menduduki nominasi IV sehingga tidak mewakili DIY ke evaluasi tingkat nasional;
- (b) Nominasi II: LKSA Al Dzikro, manggung, Wukirsari, Imogiri.
- (c) Nominasi III: LKSA Mustika Tama, Cemplung Tirtonirmolo Kasihan

(2) TKSK berprestasi:

TKSK berprestasi di tahun 2017 merupakan evaluasi tahun ke-5. Evaluasi dilakukan berjenjang dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional, hasil evaluasi tingkat kabupaten adalah:

- (a) Juara I: Aji Muhnirno, S.Psi, TKSK Kecamatan Sedayu.
- (b) Juara II: Rondiyah, TKSK Kecamatan Srandakan.

- (c) Juara III: Nur Kholis, S.Sos, TKSK Kecamatan Pajangan.
- (3) PSM berprestasi:
- Evaluasi PSM berprestasi tingkat kabupaten dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2017 diikuti oleh perwakilan PSM yang sudah dipilih oleh kecamatan. Hasil evaluasi sebagai berikut:
- (a) Juara I: Asih Purini, Imogiri Bantul.
- (b) Juara II: Hasanudin Maskuro, Tirtonirmolo Bantul.
- (c) Juara III: Edi Nurjoko, Parangtritis, Kretek Bantul.
- Evaluasi PSM tingkat Provinsi DIY tahun 2017 diwakili oleh nominasi I tingkat kabupaten tahun 2016 yaitu Sdr. Sungatifah, PSM desa Trimulyo, dan perwakilan dari Bantul mendapatkan nominasi I tingkat Provinsi DIY, sehingga berhak mewakili PSM berprestasi tingkat nasional. Dari hasil evaluasi, perwakilan Kabupaten Bantul kembali mendapatkan nominasi I di tingkat nasional dan berhak mengikuti rangkaian upacara HKSAN tingkat nasional di Jawa Timur.

b) Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan Sosial Nasional

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan rasa kesetiakawanan sosial dan kesadaran untuk ikut serta dengan pemerintah dalam penanganan kesejahteraan sosial, didukung dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 dengan efisiensi anggaran sebesar Rp68.406.500,00. Dalam rangka memperingati HKSAN tingkat Kabupaten Bantul tahun 2017, diadakan dua agenda kegiatan yaitu:

- (1) jalan sehat dan senam bersama dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2017 di di desa Sendangsari,

dimeriahkan dengan memperebutkan *doorprize* dengan hadiah utama sebuah lemari es yang diikuti oleh 700 orang peserta, serta diadakan pembagian sembako sebanyak lima paket.

(2) Sarasehan dengan tema “Kesetiakawanan Sosial Nasional Pererat Keagamaan” yang diselenggarakan pada tanggal 16 November 2017 bertempat di di balai desa Sendangsari diikuti 150 orang peserta.

4) Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp230.000.000,00 dengan satu kegiatan yaitu: pengembangan potensi pemuda. Kegiatan ini memiliki hasil terbentuknya Toti Kabupaten Bantul serta menambah keimanan dan semangat keberagaman dengan memperingati hari santri.

Kegiatan ini dengan dukungan efisiensi anggaran sebesar Rp216.835.000,00 terlaksana dengan capaian fisik 100%. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut: peringatan hari santri dengan kegiatan Apel, Santri, Kirab Santri, Pengajian Akbar, Ekspo Santri, dan Festival Hadroh:

- a) Apel santri dan kirab santri dilaksanakan pada hari Minggu, 22 Oktober 2017 dihadiri Forkompinda, seluruh OPD Kabupaten Bantul, camat se-Kabupaten Bantul, dan diikuti lebih kurang 1.000 santri dari pondok pesantren, MTsN, dan MAN yang ada di Kabupaten Bantul, bertempat di Lapangan Paseban Bantul dengan Inspektur Upacara Bupati Bantul.
- b) Kirab santri diikuti lebih kurang 1.000 santri dari pondok pesantren di Kabupaten Bantul, dimeriahkan bergodo dari Desa Bangunjiwo, Kasihan, dan bergodo dari Desa

Wonokromo, Pleret, serta andong hias sebanyak 10 buah. Start dari Lapangan Paseban Bantul menuju Masjid Agung Manunggal Bantul.

- c) Ekspo Santri dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 18 s/d 20 Oktober 2017 bertempat di halaman Masjid Agung Manunggal menampilkan karya dari santri pondok pesantren berupa peci, tas, dan lain-lain.
- d) Festival Hadroh dilaksanakan dari tanggal 18 s/d 20 Oktober 2017 diikuti 40 group dari perwakilan pondok pesantren di Kabupaten Bantul bertempat di serambi masjid Agung Manunggal Bantul.
- e) Dalam rangka peringatan hari santri tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul mengirimkan peserta kirab santri tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 2017 sebanyak 800 santri bertempat di sepanjang jalan Malioboro.
- f) Pengajian akbar dilaksanakan tanggal 25 Nopember 2017 di halaman Masjid Agung Manunggal dengan ustad KH Fauzi Arkan dari Salatiga, dimeriahkan oleh Irama Qasidah Melayu (Qasima) dari Magelang, Jawa Tengah, dengan dihadiri seluruh OPD Kabupaten Bantul, camat se-Kabupaten Bantul, lurah desa se-Kabupaten Bantul, BPD se-Kabupaten Bantul, LPMD se-Kabupaten Bantul dan santri dari pondok pesantren di Kabupaten Bantul kurang lebih 700 jamaah.

5) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini didukung anggaran sebesar Rp228.210.000,00 dengan anggaran perubahan Rp211.385.000,00 meliputi satu kegiatan yaitu pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peran serta pemuda. Pada kegiatan ini telah terserap anggaran efisiensi

dengan total sebesar Rp206.172.500,00 dan capaian fisik 100%, serta telah menghasilkan keluaran berupa pemberdayaan karang taruna. Adapun hasilnya adalah adanya karang taruna yang berprestasi sampai tingkat DIY, bulan bhakti karang taruna, dan kemah kebangsaan. Kegiatan pemberdayaan karang taruna berupa:

a) Pemilihan Karang Taruna Berprestasi

Kegiatan ini berupa pembinaan dan lomba/evaluasi pemilihan karang taruna berprestasi. Karang taruna dituntut mempunyai peran dalam penanganan kesejahteraan sosial sehingga *output*-nya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Penyelenggaraan kegiatan pemilihankarang taruna berprestasi dimulai dari seleksi di tingkat kecamatan pada bulan Februari-Maret 2017 oleh masing-masing kecamatan. Hasil terbaik tingkat kecamatan diajukan ke tingkat kabupaten. Seleksi tingkat kabupaten dengan hasil sebagai berikut:

- (1) Juara I diraih Karang Taruna “Yodha” dari Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu.
- (2) Juara II diraih Karang Taruna “Desa Sitimulyo”, dari Kecamatan Piyungan.
- (3) Juara III diraih Karang Taruna “Bhakti” dari Desa Tamantirto, Kecamatan kasihan.

Dalam evaluasi karang taruna berprestasi tingkat DIY tahun 2017, Kabupaten Bantul diwakili oleh karang taruna “Yodha” Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, dan di tingkat DIY meraih juara II sehingga tidak bisa mewakili DIY untuk maju ke tingkat nasional.

b) Bulan Bhakti Karang Taruna

Peringatan bulan bhakti karang taruna tahun 2017 dilaksanakan dengan berbagai sub kegiatan, yaitu:

- (1) Sarasehan yang diselenggarakan pada tanggal 09 September 2017 bertempat di Pendopo Balai Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, diikuti oleh 200 orang peserta.
 - (2) Jalan sehat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 September 2017, start dan finish dari kompleks balai desa Sendangsari, Pajangan, Bantul, dengan acara tambahan merti kali.
- c) Kemah Kebangsaan
- Tahun 2017 Kabupaten Bantul menjadi tuan rumah Kemah Kebangsaan Tingkat Provinsi DIY yang dilaksanakan tanggal 23-24 September 2017 di Komplek wisata kars turbing Sorobayan, Argomulyo, Sedayu, dengan kegiatan sarasehan dan bhakti sosial bedah rumah.
- d) Sosialisasi Karang Taruna
- Pemahaman mengenai karang taruna harus dipahami terutama di tingkat birokrasi kelurahan dan kecamatan serta pembina teknis. Kegiatan sosialisasi terkait karang taruna dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2017 dengan peserta 30 orang.
- e) Studi Banding Karang Taruna
- Studi banding karang taruna dimaksudkan untuk menambah wawasan tentang pola pembinaan dan pengembangan karang taruna di wilayah lain. Studi banding juga dimaksudkan sebagai mencari aspirasi kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran di tahun 2019. Adapun pelaksanaan studi banding adalah pada tanggal 27-28 November 2017 dengan peserta 50 orang.

6) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program ini dengan dukungan dana sebesar Rp213.389.000,00 dan anggaran perubahan sebesar Rp188.044.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp184.564.000,00 dan capaian fisik 100%. Keluaran program ini adalah verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan. Verifikasi dan validasi data PBI jaminan kesehatan nasional merupakan sub kegiatan baru, yang dilaksanakan sesuai Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan PBI Jamkes Tahun 2014. Data dasar penerima PBI saat ini menggunakan hasil PPLS 2011 sehingga banyak data yang tidak valid lagi dan perlu untuk diverifikasi setiap enam bulan sekali, sesuai aturan dari Kemensos. Tahun 2017 Pemda Bantul melalui Dinas Sosial telah melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap kepesertaan PBI JKN dua kali setahun diawali dengan musyawarah desa untuk *update* data kepesertaan yang meninggal, pindah, ganda, mampu maupun data tidak ditemukan kemudian mengusulkan penggantinya.

c. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini disampaikan permasalahan dan solusi terkait dengan pelaksanaan program-kegiatan dalam urusan sosial (Tabel 4.28).

Tabel 4.28
Permasalahan dan Solusi dalam Urusan Sosial

No.	Permasalahan	Solusi
1	Untuk Jenis pelatihan ketrampilan PMKS belum mampu memenuhi bakat dan keinginan masing-masing peserta	Upayannya adalah penentuan jenis pelatihan sesuai hasil musyawarah dengan pendamping PMKS
2	Rujukan dan Pengambilan pasien atau klien baik ke RSJ maupun ke Panti tidak bisa di prediksi, begitu pula dengan pemakaman Jenazah terlantar karena berupaya layanan kepada masyarakat sesuai dengan kejadian/kasus di lapangan. Hal ini juga dipengaruhi tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberadaan	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap keberadaan PMKS di wilayahnya

No.	Permasalahan	Solusi
	PMKS di wilayahnya	
3	Pada Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah, data Prelist yang akan di entry hasil verifikasinya tidak dapat di proses oleh aplikasi yang dari tnp2k	Melakukan Bimtek entru prelist dan sosialisasi MPM (mekanisme Pemutaharan Mandiri)
4	Beberapa kader desa yang berperan melakukan purifikasi belum paham dengan mekanisme yang dilaksanakan	Melakukan bimtek kepada kader desa petugas verifikasi di lapangan

Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018

B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Di bawah ini diuraikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada tahun 2017 beserta hasil-hasilnya. Khusus untuk prestasi dan penghargaan yang diraih disajikan pada Lampiran A dan target serta capaian indikator kinerja disajikan pada Lampiran B.

1. Tenaga Kerja

Masalah utama ketenagakerjaan yang dihadapi Kabupaten Bantul adalah kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang kurang optimal. Selain itu kesempatan kerja yang ada masih terbatas terutama di sektor formal, dan tambahan pada perlindungan tenaga kerja masih kurang. Pembangunan ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah, bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Fakta menunjukkan bahwa permasalahan ketenagakerjaan sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat.

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak